

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**MEMPERKUAT IMUNITAS BANGSA
GUNA MENDUKUNG INTEGRASI NASIONAL**

OLEH :

**RIKAS HIDAYATULLAH, S.E., M.M.
KOLONEL ARH NRP 1920040910570**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXI
LEMHANNAS RI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb, Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) - LXI Lemhannas RI tahun 2020, telah berhasil menyelesaikan tugas akhir berupa sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul "**MEMPERKUAT IMUNITAS BANGSA GUNA MENDUKUNG INTEGRASI NASIONAL**".

Penentuan judul Taskap dan Tutor didasarkan atas Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 81 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA – LXI Tahun 2020 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini pula, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Yth. Gubernur Lemhannas RI Bapak Letnan Jendral TNI (Purn) Agus Widjojo** yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA - LXI di Lemhannas RI tahun 2020;
2. **Tutor pembimbing Taskap Bapak Marsma TNI Dr. Agus Purwo W., M.M., M.A.** yang telah memberikan bimbingan, arahan dan koreksi yang konstruktif dalam kelancaran penulisan Taskap ini; dan
3. **Tim Pengaji**, terdiri dari :
 - a) **Prof. Dr. Sudaryono, S.U.**
 - b) **Mayjen TNI Mar (Purn) Eddy Oetomo**
 - c) **Brigjen TNI (Purn) A.R. Wetik, M.Sc**

yang telah memberikan arahan dan koreksi dalam rangka penyempurnaan serta perbaikan hingga selesainya penulisan Taskap ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih juga, penulis sampaikan kepada rekan-rekan Peserta PPRA - LXI Lemhannas RI tahun 2020 atas dukungan dan kerjasamanya yang tulus dan ikhlas. Tak lupa pula kepada isteri dan anak-anak

tercinta dan keluarga serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dorongan semangat dan moril yang telah diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Taskap ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan senang hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Taskap ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah, bimbingan, petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita semua dalam pengabdian dan sumbangsih kepada NKRI.... Aamiin Ya Rabbal Alamin.



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rikas Hidayatullah, S.E., M.M.
 Pangkat : Kolonel Arhanud.
 Jabatan : Paban - IV / Bindok Sopsad.
 Instansi : Denma Mabesad.
 Alamat : Jalan Veteran No. 5 Jakarta Pusat.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) - LXI Lemhannas RI tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 12 Oktober 2020

Penulis

Materai 6000

Rikas Hidayatullah, S.E., M.M.
Kolonel Arh NRP 1920040910570

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	6
5. Metode dan Pendekatan	7
6. Pengertian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	9
8. Peraturan Perundang-undangan	10
9. Kerangka Teoretis	12
10. Data dan Fakta	14
11. Lingkungan Strategis	19
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	27
13. Memperkuat Komponen Pertahanan Negara Dalam Mendukung Integrasi Nasional	28

14. Memperkuat Nasionalisme Bangsa Dalam Mendukung Integrasi Nasional	40
15. Memperkuat Diplomasi Pertahanan Dalam Mendukung Integrasi Nasional.....	46

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan	56
17. Rekomendasi	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejarah menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia sejatinya merupakan kerajaan-kerajaan besar, bahkan memiliki wilayah yang lebih luas dari Indonesia saat ini. Namun kerajaan tersebut hancur karena tidak mampu bertahan menghadapi persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain maupun menghadapi serangan Bangsa barat yang datang untuk menguasai tanah air baik dengan kekuatan militer maupun dengan politik adu domba. Saat ini dengan jumlah 1.340 suku Bangsa¹, ratusan bahasa, perbedaan agama dan adat istiadat serta dan tata nilai yang dianut, maka potensi terjadinya permasalahan Bangsa yang dapat menimbulkan perpecahan semakin besar, sehingga perlu adanya upaya yang terus menerus dan berkesinambungan untuk meminimalkan atau bahkan menihilkan potensi-potensi perpecahan itu.

Secara langsung maupun tidak langsung berbagai potensi penyebab perpecahan tersebut adalah merupakan permasalahan Bangsa yang sangat berpengaruh dan dapat melemahkan integrasi Nasional. Tanpa adanya integrasi Nasional, maka tujuan Nasional sangat sulit untuk dicapai. Dengan demikian imunitas Bangsa merupakan hal yang sangat penting bagi proses integrasi Nasional demi keberlangsungan NKRI. Disinilah dibutuhkan kekebalan atau imunitas Bangsa yang siap menangkal serangan terhadap persoalan Bangsa yang mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Berkaitan dengan imunitas Bangsa maka teori ketahanan Nasional Indonesia sebagai landasan konsepsional merupakan *end state* dari serangkaian proses dalam meningkatkan keuletan dan ketangguhan Bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan Nasional, yang mampu mengatasi setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang timbul dengan berorientasi kepada dua sudut pandang pokok yaitu kesejahteraan “*prosperity*” dan keamanan “*national security*”. Dengan demikian pendekatan *national security* adalah menjadi landasan yang

¹ Jumlah suku Bangsa di Indonesia <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa> diakses pada 1 Juni 2020 pukul 21.00

fundamental dalam mendesain konsep memperkuat imunitas Bangsa guna mendukung integrasi Nasional. Terkait dengan imunitas Bangsa, maka kemampuan mengembangkan kekuatan Nasional dilakukan dengan memperkuat komponen pertahanan Negara, Nasionalisme Bangsa, dan diplomasi pertahanan².

Sedangkan unsur ancamannya bagi Bangsa Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Hadi Tjahjanto (2018) adalah berbagai permasalahan yang terjadi saat ini seperti terorisme, radikalisme, sikap intoleran, provokasi dan adu domba, serta penyalahgunaan narkoba³. Dengan demikian imunitas Bangsa merupakan hal yang sangat penting bagi proses integrasi Nasional demi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Proses integrasi Nasional merupakan permasalahan strategis dan sangat kompleks dikarenakan terkait dengan konsepsi Negara Nasional. Integrasi Nasional didasarkan pada Negara yang menghendaki adanya suatu wilayah Nasional sebagai tanah air yang didukung oleh Bangsa yang utuh. Disamping itu, juga didasarkan *nation*, yaitu entitas politik yang terdiri atas warga Negara suatu Negara Nasional, dimana walaupun berbeda-beda latar belakang, ras, etnik, agama dan golongan satu sama lain, namun mempunyai kehendak yang kuat untuk bersatu di bawah payung Negara Nasional⁴. Ketidakmampuan masyarakat pada umumnya dan para pemangku kepentingan pada khususnya dalam pemahaman terhadap kewaspadaan Nasional dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Integrasi Nasional merupakan kebutuhan mutlak Bangsa Indonesia, karena Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang majemuk dan tidak akan menghilangkan kemajemukannya.

² Bahan ajaran PPRA-LXI Tahun 2020 Lemhannas RI BS Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional Hal 59

³ Sambutan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada pembukaan Rapat Paripurna (Rapurna) TMMD ke-39, bertempat di GOR A. Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/12/2018) dengan tema Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), kita tingkatkan Imunitas Bangsa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. <https://kicaunews.com/2018/12/06/panglima-tnitmmd-membangun-imunitas-bangsa/> diakses pada 9 Mei 2020 pukul 09.20

⁴ Bahan ajaran PPRA-LXI Tahun 2020 Lemhannas RI BS Kewaspadaan Nasional Hal 1

Dalam rangka mewujudkan integrasi Nasional, Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya terkait imunitas Bangsa antara lain dengan memperkuat komponen pertahanan Negara, jiwa Nasionalisme Bangsa, dan diplomasi pertahanan. Guna memperkuat komponen pertahanan Negara, telah dikeluarkan UU RI Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Nasional. Dalam Undang-undang ini telah terdapat klasterisasi komponen pertahanan Negara serta pengelompokkan *leading sector* dalam menghadapi ancaman. Pengelompokkan ini dilakukan untuk memperjelas Institusi / Lembaga yang bertanggung jawab dalam menghadapi ancaman. Begitupula untuk memperkuat Nasionalisme, telah dikeluarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). BPIP bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. BPIP juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya pelaksanaan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada Kementerian / Lembaga, organisasi sosial politik, pemerintahan daerah, dan komponen masyarakat lainnya⁵. Sedangkan untuk memperkuat diplomasi pertahanan telah diatur pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Buku Putih Pertahanan yang menyatakan kerjasama internasional bidang pertahanan diselenggarakan untuk membangun saling percaya antar Bangsa sekaligus sebagai modalitas dalam mencegah konflik dengan Negara lain⁶. Kebijakan yang ditindaklanjuti dengan penerbitan beberapa regulasi tersebut, tentu telah didukung dengan program anggaran yang tidak sedikit melalui APBN.

Bahkan tingkat kerentanan Bangsa Indonesia tidak juga menurun, dimana Indonesia pada tahun 2019 masuk dalam kategori *elevated warning* dengan indeks 70,4 atau mengalami peningkatan dari tingkat *warning* di tahun

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Buku Putih Pertahanan, Hal 81

2018 dengan indeks 67,8⁷. Potensi kerentanan tersebut diukur dengan mengacu pada *Conflict Vulnerability Index* yang menunjukkan tingkat kerawanan dimana potensi konflik dapat muncul ke permukaan apabila terdapat peningkatan ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat⁸. Peningkatan ketegangan sosial baik secara vertikal antara pemerintah dengan kelompok masyarakat maupun horizontal antar kelompok masyarakat dapat memicu kerawanan yang menimbulkan permasalahan di masyarakat. Hal ini sangat dipahami karena secara alamiah Indonesia merupakan Negara yang sangat rentan untuk terpecah belah (*naturally fragmented*) dikarenakan secara alami memiliki keanekaragaman yang sangat luas baik dari aspek suku, agama maupun antar golongan yang sangat rentan terjadinya konflik internal. Dari uraian diatas menjadi jelas betapa pentingnya imunitas Bangsa bagi keberlanjutan integrasi Bangsa. Meskipun Bangsa Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasinya, ternyata masih terjadi berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan terorisme, radikalisme, sikap intoleran, provokasi dan adu domba, serta penyalahgunaan narkoba. Dengan kondisi yang demikian, maka menjadi sangat penting untuk melakukan kajian tentang memperkuat imunitas Bangsa guna mendukung integrasi Nasional.

2. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka sangatlah penting untuk menumbuh kembangkan imunitas Bangsa tidak hanya pada saat Negara menghadapi ancaman eksternal, tetapi juga tumbuh dan berkembang pada Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman internal. Memperhatikan hal tersebut, maka perlu adanya suatu pemikiran yang lebih holistik, komprehensif dan integral dalam mengkaji persoalan tersebut di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah “*bagaimana memperkuat imunitas Bangsa guna mendukung integrasi Nasional*”. Selanjutnya, dengan

⁷ Fragile States Index, <http://fundforpeace.org/fsi/country-data/>, diakses pada 21 Mei 2020 pukul 14.17

⁸ Kim Fletcher, Marcus Marktanner, and Luc Noiset. May 2013. Developing a Conflict Vulnerability Index. ICAT Working Paper Series

mencermati rumusan masalah tersebut dan dikaitkan teori ketahanan Nasional, maka pertanyaan kajian adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana memperkuat komponen pertahanan Negara guna mendukung integrasi Nasional ?
- b. Bagaimana memperkuat Nasionalisme komponen Bangsa guna mendukung integrasi Nasional ?
- c. Bagaimana memperkuat diplomasi pertahanan guna mendukung integrasi Nasional ?

3. **Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.**

Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya memperkuat imunitas Bangsa guna mendukung integrasi Nasional serta dapat bermanfaat untuk para pemangku kepentingan sebagai berikut :

- 1) Manfaat Ilmiah, yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau menambah informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan memperkuat imunitas Bangsa guna mendukung integrasi Nasional.
- 2) Manfaat praktis, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para *stakeholders* dalam pengambilan kebijakan terkait tentang memperkuat imunitas Bangsa guna mendukung integrasi Nasional.

b. **Tujuan.**

Adapun tujuan penulisan Taskap ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan serta sebagai sumbangan pemikiran peserta kepada pemangku kebijakan guna memecahkan persoalan yang berkaitan dengan upaya memperkuat imunitas Bangsa guna mendukung integrasi Nasional dengan:

- 1) Mengetahui upaya memperkuat komponen pertahanan Negara guna mendukung integrasi Nasional.
- 2) Mengetahui upaya memperkuat Nasionalisme Bangsa guna mendukung integrasi Nasional.

- 3) Mengetahui upaya memperkuat diplomasi pertahanan guna mendukung integrasi Nasional.

4. **Ruang Lingkup dan Sistematika.**

a. **Ruang lingkup.**

Adapun ruang lingkup dalam penyusunan Taskap ini adalah membahas tentang memperkuat imunitas Bangsa khususnya dalam menghadapi persoalan dan ancaman guna mendukung integrasi Nasional. Pembahasan dibatasi pada perkuatan komponen pertahanan Negara, Nasionalisme Bangsa dan diplomasi pertahanan.

b. **Sistematika.**

Taskap ini disusun dalam empat bab yang sistematis dan saling terkait satu dengan yang lain dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1) **Bab I Pendahuluan.**

Bab ini berisi uraian umum tentang latar belakang secara umum, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan penataan tata urut penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan dalam pembahasan, serta pengertian kata / istilah penting untuk menyamakan persepsi.

2) **Bab II Tinjauan Pustaka.**

Bab ini berisi uraian landasan pemikiran, peraturan dan perundang-undangan dan beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis pokok persoalan dan pemecahan permasalahan. Selain itu, bab ini juga membahas tentang pengaruh faktor lingkungan strategis yang berisi uraian tentang perkembangan lingkungan strategis baik Global, Regional, maupun Nasional.

3) **Bab III Pembahasan.**

Bab ini berisi analisis dan gambaran kondisi obyektif tentang imunitas Bangsa, terkait memperkuat komponen pertahanan Negara, Nasionalisme Bangsa dan diplomasi pertahanan serta kondisi yang diharapkan apabila terwujud dalam mendukung integrasi Nasional. Hasil analisis tersebut dapat menggambarkan

solusi yang tepat dalam memecahkan permasalahan yang diuraikan dalam pertanyaan kajian.

4) **Bab IV Penutup.**

Bab ini berisi simpulan yang menguraikan rumusan jawaban secara sistematis, singkat dan jelas terhadap permasalahan yang muncul terkait pertanyaan kajian yang diajukan dan diakhiri dengan adanya rekomendasi sebagai saran kepada pemangku kebijakan terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam meningkatkan imunitas Bangsa.



5. **Metode dan Pendekatan.**

a. **Metode.**

Menggunakan metode penulisan berupa deskriptif analisis dan studi kepustakaan secara kualitatif, dalam penulisan Taskap ini juga menggunakan landasan teori yaitu teori pertahanan Negara, Nasionalisme, diplomasi pertahanan dan integrasi Nasional. Analisis dilakukan berdasarkan ketiga sistem dalam imunitas Bangsa yaitu komponen pertahanan Negara, Nasionalisme Bangsa, dan diplomasi pertahanan terhadap integrasi Nasional.

b. **Pendekatan.**

Menggunakan perspektif kepentingan Nasional, dengan analisis multi disiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. **Pengertian.**

a. **Imunitas Bangsa.**

Imunitas Bangsa adalah daya tahan dan daya tangkal yang dimiliki oleh Bangsa untuk menghadapi berbagai persoalan dalam konteks kesatuan Bangsa dalam bingkai budayanya⁹.

b. **Integrasi Nasional.**

Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu Integrate yang artinya memberi tempat bagi unsur tertentu demi mewujudkan suatu keseluruhan. Sementara itu, kata Nasional berasal dari bahasa Inggris

⁹ Menjaga imunitas Bangsa <https://news.detik.com/kolom/d-3708695/menjaga-imunitas-bangsa>

yaitu Nation yang artinya Bangsa. Secara umum integrasi Nasional adalah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah Nasional yang membentuk suatu identitas Nasional¹⁰.

c. **Pertahanan Negara.**

Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap Bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara¹¹.

d. **Komponen Pertahanan Negara.**

Dalam Sistem pertahanan Negara Indonesia terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung¹².

e. **Nasionalisme.**

Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu keyakinan atau ideologi politik yang melibatkan atau mengikatkan individu kepada suatu Bangsa (nation). Salah satu karakter atau elemen utama dalam Nasionalisme adalah identitas sebagai suatu Bangsa. Tanpa adanya identitas suatu Bangsa, maka sulit untuk menumbuhkan Nasionalisme masyarakat yang ada di dalamnya¹³.

f. **Diplomasi Pertahanan.**

Diplomasi pertahanan merupakan suatu cara memenangkan kepentingan Bangsa dengan menggunakan militer / pertahanan sebagai alat atau sumber daya tanpa harus mengedepankan kekerasan, dilakukan oleh perwakilan Kemenhan atau juga institusi pemerintah lainnya dengan tujuan untuk memenangkan kepentingan Nasional¹⁴.

¹⁰ Pengertian Integrasi Nasional https://thegorbalsla.com/integrasi-nasional/#Pengertian_Integrasi_Nasional_Secara_Umum diakses pada 31 Mei 2020 pukul 20.00

¹¹ Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

¹² Ibid

¹³ Muhammad A.S. Hikam, 2016. Deradikalisis: Peran Masyarakat Sipil Indonesia membendung Radikalisme, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, Hal 49.

¹⁴ Budyanto Putro Sudarsono, jonni mahroza, dan suryanto d.w. 2018. Diplomasi pertahanan indonesia dalam mencapai kepentingan Nasional. Jurnal pertahanan dan bela Negara volume 8 nomor 3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan Bangsa Indonesia didasari oleh kerangka berfikir sebagai paradigma Nasional yang berisi nilai-nilai luhur yang digali dari dalam diri Bangsa Indonesia. Paradigma Nasional tersebut mencakup Pancasila, UUD NRI 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, yang kesemuanya itu digambarkan sebagai dasar dalam berbagai analisis komprehensif untuk melaksanakan pembangunan Nasional, yang mencakup berbagai sendi kehidupan secara berkelanjutan¹⁵.

Memperkuat seluruh sendi kehidupan secara berkelanjutan baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap imunitas Bangsa yang saat ini sedang dibangun. Permasalahannya banyak ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri yang dapat menghambat terwujudnya integrasi Nasional yang telah dibangun saat ini. Oleh karena itu, memperkuat imunitas Bangsa harus dilakukan secara keseluruhan mulai dari memperkuat komponen pertahanan Negara sebagai imunitas secara fisik, memperkuat Nasionalisme sebagai imunitas yang tumbuh dari dalam, maupun memperkuat diplomasi pertahanan yang dibangun sebagai respon dari kemungkinan ancaman yang datang dari luar negeri. Disinilah perlunya paradigma Nasional dalam memperkuat imunitas Bangsa, sehingga upaya yang dilakukan selaras dengan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, akan dibahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerangka teori yang disertai dengan data dan fakta, perkembangan lingkungan strategis yang digunakan sebagai landasan pembahasan, sehingga dapat ditentukan langkah strategis dan upaya untuk mengatasinya.

¹⁵ Sunardi, R.M., 2004, Pembinaan Ketahanan Nasional (Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia), Jakarta : PT. Kuanternita

8. Peraturan Perundang-undangan.

a. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

UU RI Nomor 3 tahun 2002 Pasal 7 mengatur penyelenggaraan pertahanan Negara yang disiapkan secara dini oleh pemerintah¹⁶. Pertahanan Negara dibangun untuk menghadapi setiap ancaman baik aktual maupun potensial sesuai dengan jenis ancaman yang dihadapi. Tanpa penyiapan doktrin, sistem maupun operasionalnya, maka sistem pertahanan Negara yang bersifat semesta hanya sebatas konsep saja tanpa dapat dioperasionalkan. Dalam konteks membangun imunitas Bangsa sangat tepat apabila penyiapan komponen pertahanan Negara yang disebutkan di atas disiapkan secara komprehensif dan berkesinambungan agar digunakan sebagai penangkal awal dari setiap ancaman yang datang.

b. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan.

UU RI Nomor 23 tahun 2029 Pasal 5 menyebutkan bahwa Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang digunakan untuk Pertahanan Negara salah satunya dilaksanakan melalui usaha belanegara. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) bahwa nilai dasar belanegara antara lain cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada Pancasila, serta kerelaan berkorban untuk Bangsa dan Negara. Keseluruhan nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari Nasionalisme. Dengan demikian, maka secara mendasar Nasionalisme sebagai bagian upaya untuk memperkuat imunitas secara legalitas dapat digunakan dalam menghadapi ancaman terhadap Negara.

¹⁶ Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2002 pasal 7 tentang Pertahanan Negara

c. **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019.**

Dalam Perpres ini disebutkan pada Pasal 2 Lampiran Perpres bahwa hakikat pertahanan Negara adalah segala usaha pertahanan semesta yang pola dan pengendaliannya berdasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban setiap warga Negara serta kepercayaan pada kekuatan sendiri; mengikutsertakan segenap warga Negara dan seluruh sumber daya Nasional yang ada; disiapkan sedini mungkin oleh pemerintah serta digelar secara mutlak, tertata, terarah, dan berkesinambungan. Pertahanan Negara ditata berdasarkan pada prinsip demokrasi, HAM, kesejahteraan, lingkungan hidup, ketentuan hukum Nasional dan internasional serta prinsip hidup berdampingan yang damai, dengan fokus pada kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan¹⁷. Perpres ini juga dapat dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pertahanan Negara serta dapat digunakan sebagai imunitas Bangsa dalam menghadapi setiap ancaman.

d. **Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Buku Putih Pertahanan Negara.**

Dalam penyelenggaraan pertahanan Negara, Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi asas demokrasi yang mengutamakan kebersamaan dan kesetaraan. Dalam penyelesaian suatu masalah dilakukan melalui kesepakatan bersama, sebagai bagian dari diplomasi pertahanan yang berpedoman pada upaya memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan¹⁸. Hal ini dilakukan dengan melakukan kerja sama internasional yang dikembangkan sebagai salah satu instrumen dari diplomasi pertahanan. Kerja sama di bidang pertahanan dilakukan dengan maksud penyelenggaraan diplomasi pertahanan dikembangkan untuk mencari solusi damai dalam penanganan isu-isu keamanan yang menjadi persoalan bagi kedua belah pihak serta membangun sikap saling

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019

¹⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia. Hal 32

percaya (*trust building*). Sikap saling percaya ini sangat dibutuhkan untuk menjaga agar imunitas Bangsa tetap ada dan berkembang dalam setiap diri masyarakat Indonesia khususnya dalam berhubungan dengan Bangsa lain.

9. Kerangka Teoretis.

a. Pertahanan Negara

Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia disebutkan tujuan pertahanan Negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada empat sasaran strategis yang saling terkait. Pertama, terselenggaranya pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman militer. Kedua, terselenggaranya pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman nonmiliter. Ketiga, terselenggaranya pertahanan negara yang mampu untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional. Keempat, terselenggaranya pertahanan negara yang didukung oleh industri pertahanan yang kuat dan mandiri¹⁹.

b. Nasionalisme.

Budi Juliardi, S.H., M.Pd. (2015) menyatakan bahwa Nasionalisme merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menyatukan beberapa perbedaan, karena Nasionalisme lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sedangkan Muhammad A.S. Hikam (2016) lebih menekankan kedekatan antara individu dengan Bangsanya. Hikam mengatakan bahwa Nasionalisme dapat didefinisikan sebagai suatu keyakinan atau ideologi politik yang melibatkan atau mengikatkan individu kepada suatu Bangsa (nation)²⁰. Dengan demikian, maka salah satu karakter atau elemen utama dalam

¹⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia. Hal 41

²⁰ Muhammad A.S. Hikam, 2016. Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia membendung Radikalisme, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, Hal 49.

Nasionalisme adalah identitas sebagai suatu Bangsa. Tanpa adanya identitas suatu Bangsa, maka sulit untuk menumbuhkan Nasionalisme masyarakat yang ada di dalamnya. Kaitannya dengan imunitas Bangsa bahwa kewajiban setiap warga Negara dalam melaksanakan pertahanan Negara juga dapat diwujudkan secara aktif sebagai bagian dari rasa Nasionalisme yang tumbuh dalam jiwa seluruh rakyat Indonesia.

c. Diplomasi Pertahanan.

Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia disebutkan dalam konteks kerja sama pertahanan akan dikembangkan sebagai salah satu instrumen diplomasi dalam mewujudkan rasa saling percaya melalui bidang pertahanan. Sejalan dengan itu, diplomasi pertahanan akan lebih diefektifkan melalui langkah-langkah yang lebih konkret, aktif, dan bermartabat. Kerja sama pertahanan diarahkan bagi terwujudnya kawasan yang damai dan stabil melalui upaya bersama antarnegara serta menjunjung tinggi hak kedaulatan negara masing-masing. Selain itu dilakukan kerja sama dengan negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara yang berbatasan dengan Indonesia serta major power yang memiliki pengaruh penting bagi kawasan, termasuk yang berpengaruh terhadap kepentingan Nasional Indonesia.²¹

d. Integrasi Nasional.

Ernest Renan dalam konsepsi Bangsa menyampaikan sebagai berikut :

- 1) Suatu Bangsa adalah suatu jiwa dan suatu asas kerohanian;
- 2) Suatu Bangsa adalah satu solidaritas yang besar (*Une nation est un grand solidarité*);
- 3) Satu Bangsa tidak memerlukan; persatuan bahasa, persatuan agama dan persatuan turunan;
- 4) Suatu keinginan untuk hidup bersama baik dimasa sekjarang dan dimasa yang akan datang (*le de'sir d'être ensemble*)²².

²¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia. Hal 73

²² Bahan ajaran PPRA-LXI Tahun 2020 Lemhannas RI BS Kewaspadaan Nasional Hal 9

10. Data dan Fakta.

a. Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir ini, pembangunan di bidang pertahanan telah menunjukkan kemajuan, diantaranya peningkatan anggaran belanja pertahanan Negara pada tahun 2020 sebesar 21% dari 108,4 T pada tahun 2019 menjadi 131,2 T pada tahun 2020²³. Meskipun terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, namun anggaran tersebut hanya 5% dari APBN atau 0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio tersebut masih jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Negara tetangga Singapura yang mencapai 3% dari PDB²⁴. Terlebih lagi kondisi perekonomian yang masih kurang menguntungkan dampak dari pandemi Covid-19 saat ini, mengakibatkan banyaknya pengurangan anggaran. Sesuai dengan Pepres RI Nomor 54/2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020 pasal 1 terdapat pengurangan Rp. 8,7 T anggaran kementerian pertahanan yang semula Rp. 131,1 T menjadi Rp. 122,4 T²⁵. Pemotongan anggaran tersebut tentu saja akan menghambat pencapaian pembangunan kekuatan pertahanan Negara baik komponen utama, cadangan maupun pendukung untuk mendapatkan kekuatan nyata pertahanan Negara.

Salah satu fakta dapat dilihat dari data anggaran pertahanan yang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan anggaran pertahanan Negara lain. Amerika Serikat masih menduduki peringkat pertama sebesar \$750M disusul Cina \$237M dan Saudi Arabia diperingkat ketiga sebesar \$67,6M.

²³ Anggaran Kementerian pertahanan tahun 2020 <https://katadata.co.id/berita/2019/10/23/prabowo-pimpin-kementerian-pertahanan-dengan-anggaran-terbesar-di-2020> diakses pada 5 Juni 2020 pukul 14.30.

²⁴ Anggaran pertahanan Singapura <https://kabar24.bisnis.com/read/20190330/15/906297/cek-fakta-prabowo-sebut-anggaran-pertahanan-singapura-30-persen-dari-apbn-ini-faktanya> diakses pada 5 Juni 2020 pukul 14.30.

²⁵ Pemotongan anggaran Kementerian dan Lembaga. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/06460991/jokowi-potong-anggaran-kementerian-lembaga-demi-covid-19-berikut-rinciannya?page=all> diakses pada 27 Juni 2020 pukul 09.30.

Indonesia sendiri berada diperingkat 31 dibawah Colombia, Moroco dan Oman yang merupakan Negara-negara yang jauh lebih kecil dihadapkan dengan luas wilayah yang harus di *cover* oleh kekuatan militer²⁶. Belum seimbangnya alokasi anggaran pertahanan Indonesia berpengaruh terhadap pencapaian kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra yang telah disusun. Hal ini akan berdampak pada kekuatan, kemampuan serta gelar TNI yang belum optimal dihadapkan pada tugas, peran dan fungsi TNI dalam pelaksanaan pertahanan Negara, sehingga sasaran akhir kekuatan pokok minimum akan sulit untuk dicapai.

Jumlah ideal prajurit TNI setidaknya 1% dari jumlah penduduk.²⁷ Dengan jumlah penduduk 267Juta jiwa, maka setidaknya dibutuhkan 2,6 Juta. Saat ini jumlah Prajurit TNI ± 500.000 Personel, sehingga masih dibutuhkan sekitar 2 juta personel tambahan. Kekurangan inilah yang akan diisi oleh komponen cadangan. Bahkan Kementerian pertahanan merencanakan akan membentuk 100 Batalyon Komcad yang mulai direkrut pada bulan Maret 2020 yang lalu²⁸. Namun pada kenyataannya, sampai dengan saat ini program tersebut belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai landasan operasionalnya.

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 tahun 2013, telah ditetapkan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), yang mengamanatkan pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) baik secara mandiri maupun kelompok untuk mampu menghasilkan alat peralatan pertahanan

²⁶ Anggaran Pertahanan 2020 <https://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp> diakses pada 17 Juni 2020 pukul 06.38

²⁷ Dahnil Anzar Simanjuntak, Jumlah Ideal Prajurit TNI <https://rakyatrukun.com/dahnil-anzar-simanjuntak-urgensi-komponen-cadangan-tni/> diakses pada 27 Juni 2020 pukul 10.00

²⁸ Bondan Tiara Sofyan, Dirjen Pothan. Pembentukan Batalyon Komcad. <a href="https://www.beritasatu.com/nasional/601575-kemhan-akan-bentuk-100-batalion-komponen-cadangan#:~:text=Jakarta%2C%20Beritasatu.com%20-%20Kementerian,batalion%20Komponen%20 Cadangan%20 (Komcad). diakses pada 27 Juni 2020 pukul 10.00

dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Sementara itu, eksistensi Komponen Pendukung yang terdiri lima segmen potensi Nasional yang dapat digunakan untuk menjadi bagian dari komponen pendukung meskipun sudah menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, namun dikarenakan terkendalanya masalah regulasi, sehingga belum siap untuk dioperasionalkan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan Negara.

b. Tingkat Nasionalisme Bangsa.

Masuknya budaya asing secara langsung maupun tidak langsung telah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebut saja beberapa insiden yang terjadi di lembaga pendidikan dimana siswa tidak mau melakukan penghormatan kepada bendera pada saat upacara penaikan bendera digelar²⁹. Padahal tanpa adanya rasa Nasionalisme tentunya tidak akan ada motivasi untuk berjuang meraih kemerdekaan pada masa penjajahan dahulu. Beberapa Negara di dunia, seperti Malaysia, India, dan Pakistan, bahkan menunggu kemerdekaannya diberikan oleh Inggris. Kemerdekaan dengan pemberian tersebut tentunya tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan dan tanpa cucuran darah maupun air mata. Namun sebaliknya, nenek moyang kita lebih memilih untuk berjuang mengangkat senjata melawan penjajah. Paham yang menawarkan kebebasan ini sesungguhnya menempatkan kepentingan individu diatas segalanya yang berdampak pada lahirnya Nasionalisme.

Secara alami, Nasionalisme Bangsa Indonesia mudah sekali dipicu pada saat harga diri Bangsa diusik. Contohnya pada saat Konflik Ambalat, atau konflik apapun yang terjadi di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Tanpa pengaruh dari siapapun, seluruh Bangsa tergerak untuk menegakkan harga diri Bangsa. Gelombang

²⁹ Siswa di Batam tidak mau hormat Bendera. <https://nasional.tempo.co/read/1278327/kisah-2-siswa-smp-di-batam-tak-mau-hormat-bendera/full&view=ok> diakses pada 5 Juni 2020 pukul 16.30.

amarah yang senada juga kembali terjadi ketika Tiongkok terus menerus memicu konflik di perairan Natuna yang secara internasional disebut *south china sea*³⁰. Nilai-nilai Nasionalisme tersebut tentu saja secara alami lahir dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur Bangsa. Nilai luhur dari Pancasila untuk memupuk rasa Nasionalisme adalah sila ketiga Persatuan Indonesia yang menjadi pondasi bagi tekad Bangsa untuk menjaga NKRI. Terlebih lagi sejak reformasi bergulir mata pelajaran Pancasila tidak diajarkan lagi disekolah. Hal ini menjadikan penanaman Nasionalisme dari implementasi nilai-nilai Pancasila terabaikan.

c. Implementasi Diplomasi Pertahanan.

Peran TNI dalam diplomasi pertahanan merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini dikarenakan kekuatan TNI yang besar dapat dijadikan posisi tawar sekaligus sebagai efek daya tangkal yang tangguh dari potensi ancaman. Diplomasi pertahanan yang dilakukan saat ini dengan mengirimkan pasukan dalam misi perdamaian. Namun demikian, jumlah pasukan yang dikirim dalam misi perdamaian dari tahun ke tahun belum mencukupi target yang ditentukan. Meskipun di ASEAN, Indonesia merupakan Negara yang paling banyak mengirimkan personelnya ke dalam misi PBB, namun belum memenuhi target yang ditentukan. Sampai dengan April 2020 terdapat 2.847 personel yang ditugaskan dalam misi PBB³¹. Presiden Jokowi sendiri menargetkan sejumlah 4.000 personel pasukan yang dapat dikirim dalam operasi perdamaian³². Dengan terbatasnya jumlah personel yang dikirimkan akan berpengaruh terhadap kemampuan diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia. Belum

³⁰ Pelanggaran wilayah di Perairan Natuna <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna> diakses pada 5 Juni 2020 pukul 16.30.

³¹ UN Peacekeeping Operation. Jumlah personel dalam operasi perdamaian <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/06/12/indonesia-menjadi-negara-dengan-jumlah-personil-pasukan-perdamaian-pbb-terbanyak-di-asean> diakses pada 27 Juni 2020 pukul 10.45.

³² Presiden Joko Widodo. Target jumlah pasukan kontingen PBB. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01300775/pasukan-penjaga-perdamaian-asal-indonesia-hampir-4000-orang-kontingen-garuda> diakses pada 27 Juni 2020 pukul 10.45.

lagi dihadapkan pada kualitas personel dan posisi jabatan yang dikirimkan pada operasi perdamaian. Saat ini Indonesia belum memiliki personel yang menduduki jabatan strategis dalam operasi perdamaian.

Diplomasi pertahanan dalam menyelesaikan sengketa *Flight Information Region* (FIR) sejauh ini masih belum berhasil mengembalikan pengelolaan wilayah udara Indonesia seutuhnya. Diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa FIR di Kepulauan Natuna dengan Singapura adalah dengan menggunakan diplomasi *Joint Management* dimana diadakannya pengelolaan bersama antara Indonesia dengan Singapura dengan wujud *good neighbouring* dan *win-win solution*. Ditandai dengan adanya kerjasama pelatihan militer di Kepulauan Natuna dan pengumpulan hasil dari RANS Charges dan diberikan kepada Indonesia³³.

Disisi lain konsep politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, politik luar negeri, serta peraturan perundang undangan dan hukum internasional³⁴. Prinsip bebas aktif tersebut dilaksanakan melalui diplomasi yang aktif dan antisipatif. Bebas aktif juga tidak diartikan netral melainkan politik luar negeri yang bebas dalam menentukan sikap dan kebijakan terhadap persoalan internasional. Kebebasan dalam bersikap inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan sebagai bagian dari diplomasi Negara. Posisi tawar militer sebagai instrumen diplomasi akan sangat tergantung dari kapasitas dan kapabilitas TNI saat ini.

Dari segi kemampuan dihadapkan pada tugas diplomasi juga belum optimal baik dari segi personil maupun strategi. Keterbatasan bahasa dan wawasan menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan tugas diplomasi. Begitupula dari sisi strategi, TNI perlu merumuskan kembali strategi yang komprehensif dalam diplomasi. Kegiatan diplomasi yang

³³ <https://media.neliti.com/media/publications/33119-ID-diplomasi-indonesia-dalam-menyelesaikan-sengketa-fir-flight-information-region-d.pdf>. Diunduh tanggal 27 Juni 2020 pukul 20.45

³⁴ Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pasal 2 dan 5

dilakukan oleh TNI dalam pelaksanaanya belum tersusun dalam satu strategi diplomasi yang utuh. Pelaksanaan diplomasi yang dilakukan oleh masing-masing Angkatan masih dilaksanakan secara sendiri-sendiri tanpa strategi diplomasi yang utuh. Pelaksanaan diplomasi yang dilakukan oleh TNI masih terkesan sebagai rutinitas program tanpa adanya target capaian tertentu seperti layaknya suatu strategi.

11. Lingkungan Strategis.

a. Global.

Berakhirnya perang dingin menjadikan Amerika Serikat (AS) sebagai Negara super power dunia. Sebagai hasilnya AS sebagai kekuatan terbesar dalam bidang militer, politik dan ekonomi³⁵. Dengan kondisi tersebut, AS terus berupaya agar menjadi penentu dalam segala aspek yang terjadi di dunia. Keterlibatan Rusia di Ukraina, Krimea, dan Suriah menunjukkan dominasi Rusia di Kawasan. Meskipun secara ekonomi Rusia belum berkembang secara cukup signifikan, namun dari segi teknologi militer khususnya telah memberikan posisi tawar yang cukup tinggi di Kawasan. Disamping itu saat ini dengan mewabahnya pandemi Covid-19 yang menimpa hampir seluruh negara di dunia telah menimbulkan sikap saling curiga antar Bangsa. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kemungkinan ancaman penyebaran wabah penyakit, baik disebabkan faktor alami maupun karena adanya upaya yang dirancang secara sistematis (perang biologi). Perkembangan kekuatan militer Tiongkok dan strategi Rebalancing AS menentukan perubahan lingkungan strategis pada beberapa tahun ke depan. Dari sisi pertahanan, maka Indonesia tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan pertahanan yang bertumpu pada kekuatan TNI saja, tetapi harus dapat memanfaatkan seluruh potensi sumber daya pertahanan secara maksimal baik dalam penguatan komponen utama pertahanan Negara maupun kemampuan diplomasi pertahanan.

³⁵ Alida Tomja, "Polarity and International System Consequences", Interdisciplinary Journal of Research and Development, Vol. I, No. 1, 2014, Hal 58-59

b. Regional.

Kawasan Asia Pasifik dan Kawasan Laut China Selatan merupakan kawasan strategis yang bernilai ekonomis secara strategis sangat penting dan sekaligus berpotensi menjadi wilayah persaingan yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Persengketaan di Laut China Selatan dapat berpotensi menjadi konflik karena tiga alasan. *Pertama*, persengketaan yang terjadi di kawasan tersebut melibatkan Negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Taiwan, dan China. *Kedua*, para pihak yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan menggunakan instrumen militer untuk menegaskan klaimnya. *Ketiga*, belum ada bentuk mekanisme penyelesaian konflik yang kredibel. Kawasan Asia Tenggara masih rawan terhadap kejahatan lintas negara. Sesuai dengan World Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime tahun 2002, di kawasan Asia Tenggara terdapat beberapa jenis kejahatan lintas negara seperti: perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, seapiracy, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, kejahatan ekonomi internasional, dan kejahatan siber.³⁶ Perkembangan di kawasan Asia Pasifik harus menjadi pertimbangan utama bagi Indonesia untuk membangun kekuatan pertahanan Negara, sehingga sebagai Negara besar di kawasan Asia, mampu berperan sebagai penyeimbang stabilitas di kawasan³⁷.

c. Nasional.
1) **Geografi.**

Indonesia telah mengajukan 3 (tiga) Alur Laut kepulauan Indonesia (ALKI) yaitu ALKI I digunakan saat berlayar dari Laut Cina Selatan, ALKI II dipakai saat berlayar dari Laut Sulawesi, dan ALKI III digunakan pada saat berlayar dari Samudera Pasifik³⁸. Kondisi tersebut berdampak pada pembangunan komponen pertahanan

³⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia, Hal. 19

³⁷ Ibid. Hal. 1

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2002, tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia

Negara tidak hanya didasarkan pada luas wilayah tetapi juga potensi ancaman yang mungkin timbul akibat dibukanya ALKI bagi kepentingan kapal asing termasuk kapal militer. Berkaitan dengan imunitas Bangsa, kondisi di atas akan berpengaruh terhadap pembangunan komponen pertahanan Negara dan diplomasi pertahanan Indonesia.

2) Demografi.

Jumlah Penduduk Indonesia yang telah mencapai \pm 267 juta (Bappenas, 2018) yang diiringi dengan meningkatnya jumlah usia produktif sebagai “bonus demografi”. Indonesia diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2020-2030 merupakan modal utama dalam penyelenggaraan pertahanan Negara³⁹. Besarnya jumlah penduduk tersebut juga diimbangi dengan keanekaragaman suku dan bahasa di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyampaikan saat ini Indonesia memiliki 714 suku dan lebih dari 1.100 bahasa⁴⁰. Bonus demografi dan keanekaragaman masyarakat Indonesia tersebut dapat menjadi peluang sekaligus kendala dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan imunitas Bangsa kondisi di atas akan berpengaruh terhadap pembangunan komponen pertahanan Negara dan Nasionalisme Bangsa.

3) Sumber Kekayaan Alam (SKA).

Pada tahun 2019 cadangan minyak Indonesia sebanyak 226,62 juta barel berdasarkan data dari SKK Migas. Meski demikian, dalam 15 tahun terakhir aktivitas eksplorasi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini berimplikasi pada cadangan minyak dimasa mendatang. Untuk mewujudkan kedaulatan dan

³⁹ Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas dengan topik Optimalisasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

⁴⁰ Presiden Joko Widodo, Jumlah suku dan Bahasa di Indonesia <https://news.detik.com/berita/d-4490647/jokowi-sebut-ri-punya-714-suku-dan-lebih-dari-1100-bahasa-ini-faktanya> diakses pada 27 Juni 2020 pukul 15.00

kemandirian energi, Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar. 80% sumber perminyakan dikelola oleh swasta maupun pihak asing yang kurang memberi manfaat perekonomian untuk rakyat⁴¹. Belum lagi banyaknya mafia Migas yang mengakibatkan pemanfaatan Migas menjadi kurang optimal. Banyaknya persoalan dalam pengelolaan SKA, sangat berpengaruh dalam pembangunan Nasional secara keseluruhan. Berkaitan dengan imunitas Bangsa secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam keikut sertaannya membangun Nasionalisme yang bersumber dari dalam.

4) Ideologi.

Pancasila sebagai ideologi Negara yang menjadi acuan dan orientasi Bangsa mengalami degradasi dalam implementasinya. Aksi kekerasan yang merajalela di masyarakat, hilangnya nilai-nilai Pancasila yang menekankan multikulturalitas, kebhinnekaan dan nilai keadilan. Kecenderungan menguatnya ego kedaerahan (*ethno-nationalism*) memperlihatkan indikasi menurunnya pemahaman terhadap ideologi Negara. Pemahaman terhadap Pancasila serta terjadinya pengeroisan nilai-nilai Pancasila juga diakibatkan oleh aktivitas kelompok-kelompok radikal, baik secara terbuka maupun tertutup yang berkembang di dalam masyarakat. Kondisi aspek ideologi ini sangat dominan dalam melemahkan imunitas Bangsa Indonesia.

5) Politik.

Populisme dalam sistem politik yang ada di Indonesia berkembang dengan cukup dinamis. Secara positif dapat menjadi penyeimbang bagi pemerintah dalam melaksanakan programnya, namun disisi lain dapat menjadi penghambat pembangunan Nasional secara keseluruhan apabila kurang adanya kontrol dalam

⁴¹ <https://www.beritasatu.com/ekonomi/94508-asing-kuasai-85-persen-migas-indonesia> diakses pada 4 Juli 2020 pukul 22.00

penanganannya. Hal ini tentu saja akan membahayakan sistem demokrasi yang sudah ada saat ini dengan menggunakan politik identitas sebagai kekuatan utamanya. Hal ini dapat terlihat pada pelaksanaan pesta demokrasi yang lalu dimana penggunaan agama sebagai identitas kelompok tertentu sangat terlihat dalam kampanye-kampanye yang dilakukan. Apabila dibiarkan tentu saja akan dapat mengganggu keutuhan Bangsa sebagai pilar dari imunitas Bangsa yang telah dibangun saat ini. Kondisi aspek politik ini berdampak dominan dalam melemahkan imunitas Bangsa.

6) **Ekonomi.**

Bencana pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah meluluhlantakkan pertumbuhan ekonomi banyak Negara termasuk Indonesia. Bahkan Menteri Keuangan memperkirakan pertumbuhan pada tingkat 2,5% bahkan bisa -4% bila tidak dapat ditangani dalam waktu dekat⁴². Angka tersebut tentu saja jauh dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yang sebesar 5,02%⁴³. Artinya bahwa stabilitas ekonomi pasca pandemi Covid-19 sangat rendah. Anggaran Negara akan diprioritaskan untuk menanggulangi pandemi tersebut maka pembangunan kekuatan pertahanan Negara juga akan menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Kondisi aspek ekonomi ini sangat dominan dalam melemahkan imunitas Bangsa Indonesia.

7) **TANHANA Sosial Budaya.**

Di era globalisasi saat ini, kehadiran Medios sebagai komunikasi modern telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya menjadikan media sosial sarana berkomunikasi, tetapi juga menjadi sarana dalam mempengaruhi seluruh kehidupan bermasyarakat. Pada akhirnya muncul banyak

⁴² Pertumbuhan ekonomi pasca pandemic Corona <https://www.suaramerdeka.com/news/opini/225802-ekonomi-di-masa-pandemi-covid-19> diakses pada 14 Juni 2020 pukul 20.00

⁴³ Pertumbuhan ekonomi tahun 2019. <https://bisnis.tempo.co/read/1303775/penyebab-pertumbuhan-ekonomi-2019-turun-jadi-502-persen> diakses pada 13 Juni 2020 pukul 20.00

hoax yang berpengaruh terhadap seluruh kehidupan masyarakat. Apabila kontrol terhadap Medsos tidak dapat dilakukan dengan baik, maka akan mempersulit upaya untuk memperkuat imunitas Bangsa khususnya rasa Nasionalisme Bangsa.

8) Pertahanan Keamanan.

Menurut hasil riset lembaga non profit *Global Fire Power* (GFP) Pada tahun 2020 Indonesia tercatat sebagai kekuatan militer ke-16 dari 138 Negara di dunia⁴⁴. Angka tersebut turun dari tahun 2019 yang menduduki peringkat 9 dari 138 Negara⁴⁵. Meskipun tercatat sebagai 1 dari 10 kekuatan militer terkuat di dunia pada tahun 2019, namun Alutsista yang dimiliki oleh TNI perlu banyak peremajaan. Dari sejumlah kapal perang menunjukkan tahun pembuatan lama dan kurang memiliki manuver yang handal. Belum lagi dihadapkan dengan luas wilayah dan tuntutan tugas yang harus dihadapi, maka ketersediaan Alutsista masih jauh dari harapan. Dengan turunnya peringkat kekuatan militer pada tahun 2020, maka akan semakin sulit untuk meningkatkan kemampuan komponen pertahanan Negara yang lain khususnya dalam pembangunan komponen cadangan serta tentunya diplomasi pertahanan kita pun akan tidak optimal yang pada akhirnya dapat melemahkan imunitas Bangsa.

d. Peluang dan Kendala.

- 1) Peluang
 - a) Mencermati perkembangan di tataran global, maka konflik yang berkembang saat ini khususnya yang terjadi antara negara-negara maju menjadi pertimbangan dan sekaligus memberikan peluang yang cukup besar dalam memperkuat imunitas bangsa.

⁴⁴ Kekuatan militer Indonesia tahun 2020. https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=idonesia diunduh pada 17 April 2020 pukul 19.00

⁴⁵ Kekuatan militer Indonesia tahun 2019 <https://www.goriau.com/berita/baca/skor-kekuatan-militer-negaranegara-dunia-tahun-2019-indonesia-posisi-ke-berapa.html> diunduh pada 17 April 2020 pukul 19.00

- b) Konstelasi Geografis sebagai negara kepulauan yang terletak pada posisi silang, merupakan keunggulan komparatif Negara Indonesia yang bisa digunakan sebagai posisi tawar dalam rangka memperkuat imunitas bangsa untuk mendukung kepentingan nasional Bangsa Indonesia.
- c) Meningkatnya angka perbandingan pada jumlah usia produktif dari keseluruhan jumlah Penduduk Indonesia yang diwarnai dengan meningkatnya usia produktif sebagai bonus demografi bila dikelola dengan baik akan menjadi effek pengganda dalam upaya memperkuat imunitas bangsa. Jumlah penduduk yang besar dapat dikelola untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai sumber kekuatan dalam memperkuat imunitas bangsa.
- d) Sumber kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Dengan demikian semakin besar pendapatan negara, maka akan semakin besar pula pemerintah mengalokasikan dana bagi pembangunan nasional. Pembangunan nasional tersebut pada akhirnya akan menurunkan ketimpangan antara si kaya dan si miskin yang pada akhirnya dapat memperkecil konflik yang terjadi diindonesia sebagai salah satu penghambat dalam memperkuat imunitas bangsa.
- e) Telah tergelar kekuatan TNI baik secara struktural maupun kultural sebagai komponen utama yang sedang ditingkatkan kualitasnya untuk menuju kekuatan pokok minimum (MEF), menjadi modal dasar desain pembangunan kekuatan pertahanan negara serta menjadi stimulan guna terwujudnya kekuatan riil pertahanan negara.

2) Kendala

- a) Kondisi lingkungan Global yang diwarnai oleh maraknya konflik bersenjata, aksi spionase, dan kecenderungan metamorfosa

konflik kontemporer, telah menjadi kendala dalam membangun kekuatan pertahanan negara, karena isu-isu tersebut setiap saat dapat digunakan oleh negara-negara maju untuk melemahkan upaya pembangunan kekuatan pertahanan negara, jika dirasakan akan mengganggu kepentingan nasionalnya.

- b) Dinamika perkembangan keamanan di kawasan Asia Pasifik dengan dominasi Cina. Apabila terjadi peningkatan eskalasi, maka minimal Indonesia akan merasakan limpahan “spill over” konflik atau bahkan kemungkinan akan terjadi penggiringan Indonesia sebagai *war theater* apabila konflik tersebut melibatkan kekuatan besar diluar negara *claimant*. Hal ini tentunya juga akan menghambat pembangunan kekuatan pertahanan.
- c) Politik identitas akan semakin banyak digunakan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Gerakan ini telah berevolusi dari yang semula hanya didominasi oleh penguasa-penguasa kecil pada era kolonialisme menjadi dominasi semua kelompok masyarakat⁴⁶. Kondisi perekonomian Indonesia yang masih mengalami tantangan akibat dari ketidak pastian ekonomi global serta melemahnya pertumbuhan akibat dari pandemi Covid-19, telah menjadi kendala dalam peningkatan dukungan anggaran dalam segala bidang. Perubahan nilai-nilai sosial budaya bangsa mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap dan cara bertindak generasi penerus bangsa menjadi kendala dalam upaya memperkuat imunitas bangsa. Rapuhnya jiwa dan semangat kebangsaan menjadi potensi ancaman yang paling besar bagi keutuhan Bangsa. Apabila dibiarkan maka dapat menghambat dalam upaya penguatan imunitas Bangsa.

⁴⁶ Hadiz, V. R., 2014. A New Islamic Populism and the Contradictions of Development. *Journal of Contemporary Asia*, 44(1), Hal. 125-143

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan Nasional tidak akan dapat berlangsung karena pada dasarnya keduanya merupakan nilai intrinsik yang ada dalam kehidupan Nasional. Dalam kehidupan Nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan Nasional merupakan tolak ukur ketahanan Nasional. Peran masing-masing Gatra dalam Astagrata seimbang dan saling mengisi. Maksudnya antargatra mempunyai hubungan yang saling terkait dan saling bergantung secara utuh menyeluruh membentuk tata laku masyarakat dalam kehidupan Nasional. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan Bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai Nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sedangkan keamanan adalah kemampuan Bangsa untuk melindungi nilai-nilai Nasionalnya terhadap ancaman dari luar negeri.⁴⁷

Imunitas Bangsa merupakan suatu keniscayaan dalam menghadapi setiap ancaman yang semakin kompleks baik macam maupun bentuknya, yang datang dari dalam maupun luar negeri, agar integrasi Nasional dapat terwujud. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, ternyata berbagai permasalahan Bangsa seperti terorisme, radikalisme, sikap intoleran, provokasi dan adu domba, serta penyalahgunaan narkoba tetap saja terjadi.

Pada bab ini akan diuraikan menguraikan data dan fakta, peluang dari perkembangan lingkungan strategis yang selanjutnya ditemukan dampak yang timbul dan faktor penyebab masalah. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teori yang terkait dari setiap pertanyaan kajian sampai dengan ditemukan solusinya pemecahan masalahnya.

⁴⁷ Pengertian - ketahanan - nasional <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-ketahanan-nasional/>

13. Memperkuat Komponen Pertahanan Negara Dalam Mendukung Integrasi Nasional.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir ini, pembangunan di bidang pertahanan telah menunjukkan kemajuan, diantaranya peningkatan anggaran belanja pertahanan Negara pada tahun 2020 sebesar 21% dari 108,4 T pada tahun 2019 menjadi 131,2 T pada tahun 2020⁴⁸. Meskipun terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, namun anggaran tersebut hanya 5% dari APBN atau 0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio tersebut masih jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Negara tetangga Singapura yang mencapai 3% dari PDB⁴⁹. Terlebih lagi kondisi perekonomian yang masih kurang menguntungkan dampak dari pandemi Covid-19 saat ini, mengakibatkan banyaknya pengurangan anggaran. Sesuai dengan Perpres RI Nomor 54/2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020 pasal 1 terdapat pengurangan Rp. 8,7 T anggaran kementerian pertahanan yang semula Rp. 131,1 T menjadi Rp. 122,4 T⁵⁰. Pemotongan anggaran tersebut tentu saja akan menghambat pencapaian pembangunan kekuatan pertahanan Negara baik komponen utama, cadangan maupun pendukung untuk mendapatkan kekuatan nyata pertahanan Negara.

Salah satu fakta dapat dilihat dari data anggaran pertahanan yang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan anggaran pertahanan Negara lain. Amerika Serikat masih menduduki peringkat pertama sebesar \$750M disusul Cina \$237M dan Saudi Arabia diperingkat ketiga sebesar \$67,6M. Indonesia sendiri berada diperingkat 31 dibawah Colombia, Morocco dan Oman yang merupakan Negara-negara yang jauh lebih kecil dihadapkan dengan luas

⁴⁸ Anggaran Kementerian pertahanan tahun 2020 <https://katadata.co.id/berita/2019/10/23/prabowo-pimpin-kementerian-pertahanan-dengan-anggaran-terbesar-di-2020> diakses pada 5 Juni 2020 pukul 14.30.

⁴⁹ Anggaran pertahanan Singapura <https://kabar24.bisnis.com/read/20190330/15/906297/cek-fakta-prabowo-sebut-anggaran-pertahanan-singapura-30-persen-dari-apbn-ini-faktanya> diakses pada 5 Juni 2020 pukul 14.30.

⁵⁰ Pemotongan anggaran Kementerian dan Lembaga. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/06460991/jokowi-potong-anggaran-kementerian-lembaga-demi-covid-19-berikut-rinciannya?page=all> diakses pada 27 Juni 2020 pukul 09.30.

wilayah yang harus di *cover* oleh kekuatan militer⁵¹. Belum seimbangnya alokasi anggaran pertahanan Indonesia berpengaruh terhadap pencapaian kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra yang telah disusun. Hal ini akan berdampak pada kekuatan, kemampuan serta gelar TNI yang belum optimal dihadapkan pada tugas, peran dan fungsi TNI dalam pelaksanaan pertahanan Negara, sehingga sasaran akhir kekuatan pokok minimum akan sulit untuk dicapai.

Jumlah ideal prajurit TNI setidaknya 1% dari jumlah penduduk⁵². Dengan jumlah penduduk 267Juta jiwa, maka setidaknya dibutuhkan 2,6 Juta. Saat ini jumlah Prajurit TNI ± 500.000 Personel, sehingga masih dibutuhkan sekitar 2 juta personel tambahan. Kekurangan inilah yang akan diisi oleh komponen cadangan. Bahkan Kementerian pertahanan merencanakan akan membentuk 100 batalyon Komcad yang mulai direkrut pada bulan Maret 2020 yang lalu⁵³. Namun pada kenyataannya, sampai dengan saat ini program tersebut belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah sebagai landasan operasionalnya.

Melalui Perpres No. 59 tahun 2013, telah ditetapkan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), yang mengamanatkan pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) baik secara mandiri maupun kelompok untuk mampu menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Sementara itu, eksistensi Komponen Pendukung yang terdiri lima segmen potensi Nasional yang dapat digunakan untuk menjadi bagian dari komponen pendukung meskipun sudah menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat,

⁵¹ Anggaran Pertahanan 2020 <https://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp> diakses pada 17 Juni 2020 pukul 06.38

⁵² Dahnil Anzar Simanjuntak, Jumlah Ideal Prajurit TNI <https://rakyatrukun.com/dahnil-anzar-simanjuntak-urgensi-komponen-cadangan-tni/> diakses pada 27 Juni 2020 pukul 10.00

⁵³ Bondan Tiara Sofyan, Dirjen Pothan. Pembentukan Batalyon Komcad. <a href="https://www.beritasatu.com/nasional/601575-kemhan-akan-bentuk-100-batalion-komponen-cadangan#:~:text=Jakarta%2C%20Beritasatu.com%20-%20Kementerian,batalion%20Komponen%20 Cadangan%20 (Komcad). diakses pada 27 Juni 2020 pukul 10.00</p>

berbangsa dan bernegara di Indonesia, namun dikarenakan terkendalanya masalah regulasi, sehingga belum siap untuk dioperasionalkan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan Negara.

Sistem pertahanan dan keamanan Negara yang bersifat semesta mempunyai ciri-ciri yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Ciri kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan. Namun sejauh ini hal tersebut masih belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih terjadinya pro dan terkait dengan pemahaman tentang komponen cadangan yang dipersepsikan oleh sebagian masyarakat sebagai wajib milter.

Dari data dan fakta yang ada, sehingga berdampak pada belum optimalnya kekuatan komponen pertahanan Negara dalam mendukung integrasi Nasional, yaitu; 1) Kekuatan komponen pertahanan Negara dibangun untuk menghadapi setiap ancaman yang muncul dari dalam maupun luar negeri. Belum optimalnya kekuatan pertahanan Negara saat ini berdampak pada belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pertahanan Negara. Akibatnya peran serta komponen cadangan dan pendukung sebagai bagian dari pertahanan Negara belum dapat mewujudkan suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta. Komponen cadangan dan pendukung yang seharusnya sebagai penguat komponen utama belum dapat dilaksanakan dengan optimal mengakibatkan keikutsertaan warga Negara dalam pertahanan Negara juga menjadi kurang optimal; 2) Belum optimalnya kekuatan pertahanan Negara juga berdampak pada kesepakatan yang telah disusun oleh para pendiri Bangsa. Pertahanan Negara yang seharusnya dilaksanakan melalui sebuah sistem yang bersifat semesta tidak dilakukan dengan optimal karena sampai dengan saat ini pembangunan komponen cadangan maupun pendukung masih terkendala banyak faktor, salah satunya berkaitan dengan anggaran. Pada tingkat Nasional hal ini berpengaruh terhadap pembentukan komponen cadangan yang sudah direncanakan.

Meskipun demikian, belum optimalnya kekuatan komponen cadangan juga berdampak pada kebijakan para pemangku kepentingan untuk segera menyusun komponen pertahanan Negara yang kuat salah satunya komponen cadangan, yang dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala; dan 3) Pertahanan Negara disusun dalam suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta, dalam artian untuk mempertahankan Negara dari setiap ancaman yang datang tidak mungkin dapat dihadapi oleh salah satu komponen pertahanan Negara saja. Oleh karena itu integrasi antara ketiga komponen pertahanan Negara harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Belum optimalnya kekuatan pertahanan Negara berdampak pada belum terbangunnya sistem pertahanan yang bersifat semesta tersebut. Pada akhirnya belum dapat memberikan efek daya tangkal yang tangguh terhadap setiap ancaman yang datang.

Adapun Faktor penyebab belum optimalnya kekuatan komponen pertahanan Negara dalam mendukung integrasi Nasional yaitu; 1) Kurangnya edukasi terhadap masyarakat khususnya dalam hal belanegara. Belanegara seharusnya menjadi kewajiban setiap warga Negara yang harus dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah. Pendidikan belanegara bagi warga Negara sejak usia dini masih sangat terbatas, tidak ada dalam kurikulum pendidikan di sekolah, termasuk kegiatan ektra kurikuler untuk kepentingan tersebut masih sangat terbatas. Penanaman rasa cinta kepada tanah air, seharusnya telah ditanamkan sejak kecil, agar partisipasi setiap warga Negara untuk ikut serta dalam mempertahankan Negara menjadi kuat karena telah dipupuk dari usia dini; 2) Belum optimalnya sosialisasi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya Nasional. UU RI Nomor 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) telah mengamanatkan tentang pembinaan maupun penggunaan komponen pertahanan Negara. Namun demikian, sosialisasi terhadap Undang-undang tersebut masih sangat minim. Ditambah lagi belum tersedianya regulasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) dalam hal pelaksanaannya mengakibatkan keikutsertaan warga Negara dalam hal pertahanan Negara masih sangat terbatas; 3) Dis-orientasi persepsi tentang partisipasi komponen Bangsa dalam upaya pertahanan Negara. Pelaksanaan fungsi merupakan tanggung jawab seluruh komponen Bangsa dan Negara.

Namun demikian, tingkat partisipasi warga Negara atau masyarakat sebagai bagian dari sistem pertahanan Negara yang bercirikan kesemestaan belum optimal, karena tingkat pemahaman dan kesadaran sebagian masyarakat yang masih rendah. Rendahnya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat ini diantaranya diakibatkan karena dis-orientasi persepsi yang menganggap bahwa upaya pertahanan Negara hanya menjadi tanggung jawab dan urusan TNI saja. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pertahanan Negara ini menjadi faktor kontra produktif dalam menghadapi ancaman kekinian yang bersifat multi-dimensi terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI; 4) Perbedaan persepsi berkaitan dengan pertahanan Negara. Dalam arti luas, pertahanan terhadap Negara tidak hanya berkaitan dengan ancaman militer berupa agresi militer, tetapi juga ancaman non militer yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara atau yang disebut dengan ancaman non militer. Dalam menghadapi ancaman non militer seharusnya menempatkan Lembaga non pertahanan sebagai unsur utama pertahanan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun demikian sampai dengan saat ini belum ada satupun Lembaga non pertahanan yang memiliki rencana kontinjensi dalam menghadapi ancaman sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 5) Belum terwujudnya kebijakan pertahanan Negara. Kebijakan pertahanan Negara yang disusun setiap tahun oleh kementerian pertahanan belum dapat diwujudkan sesuai dengan perencanaan. Dalam Keputusan Menhan Nomor KEP / 104 / M / I / 2020 salah satunya adalah mewujudkan komponen cadangan yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi serta komponen pendukung yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia. Pada kenyataannya sampai dengan Semester II 2020 kebijakan tersebut belum dapat terwujud. Dengan belum terwujudnya komponen cadangan dan komponen pendukung, maka sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan mengintegrasikan seluruh komponen pertahanan Negara juga belum dapat diwujudkan dengan optimal; dan 6) Belum tersedianya regulasi pada tataran operasional yang mengintegrasikan seluruh komponen pertahanan Negara. Meskipun UU Nomor 23/2019 tentang PSDN telah mengamanatkan pembentukan komponen cadangan dan pendukung, namun pada kenyataannya belum ada satupun regulasi yang mengatur tentang

integrasi ketiga komponen pertahanan Negara tersebut. Pada akhirnya peran serta ketiga komponen pertahanan Negara belum memiliki konsep yang digunakan untuk kepentingan pertahanan Negara dalam satu kesatuan. Dengan belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang integrasi ketiga komponen pertahanan Negara pada tataran operasional, maka dalam perumusan kebijakan dan strategi pertahanan Negara juga belum mampu menuangkan suatu aturan pelibatan yang mengatur keselarasan dan sinergisme kelembagaan antar komponen Bangsa, para pemangku kepentingan, institusi (K/L) yang menjadi sebuah kerangka dasar kebijakan umum pertahanan Negara yang merupakan penjabaran dari kebijakan keamanan Nasional (*national security policy-NSP*).

Dengan mencermati pengaruh perkembangan lingkungan strategis saat ini, khususnya yang terjadi antara negara-negara maju menjadi pertimbangan dan sekaligus memberikan peluang yang cukup besar dalam memperkuat imunitas Bangsa. Dimana gelar kekuatan TNI baik secara struktural maupun kultural sebagai komponen utama yang sedang ditingkatkan kualitasnya untuk menuju kekuatan pokok minimum (MEF), menjadi modal dasar desain pembangunan kekuatan pertahanan negara serta menjadi stimulan guna terwujudnya kekuatan riil pertahanan negara.

Terkait dengan data dan fakta serta peluang dari perkembangan lingkungan strategis tersebut di atas, maka sangat relevan bila diterapkan teori pertahanan Negara yang menyatakan bahwa ada empat sasaran strategis yang saling terkait dalam pertahanan Negara yaitu; Pertama, terselenggaranya pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman militer. Kedua, terselenggaranya pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman nonmiliter. Ketiga, terselenggaranya pertahanan negara yang mampu untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional. Keempat, terselenggaranya pertahanan negara yang didukung oleh industri pertahanan yang kuat dan mandiri.

Solusi untuk memperkuat komponen pertahanan Negara dalam mendukung integrasi Nasional, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesadaran belanegara masyarakat. Esensi belanegara seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 antara lain perlunya

belanegara. Karena sampai saat ini masih lemah / rendah sehingga perlu dikembangkan dengan sistem dan pola baru disesuaikan dengan kondisi saat ini. Membangun kesadaran belanegara dilakukan kepada seluruh rakyat secara bertahap dalam rangka membangun daya tangkal Bangsa dan Negara yang bertumpu pada keterpaduan seluruh komponen kekuatan pertahanan. Pembinaan kesadaran belanegara dan kewaspadaan Nasional segenap SDM/ Aparatur Negara dan seluruh rakyat mencakup komponen rakyat tak bersenjata dan komponen rakyat bersenjata (TNI-Polri) dengan bertumpu pada Sishanta. Upaya nyata dalam pelaksanaan pembinaan kesadaran bela Negara dilakukan dengan cara:

- a) Kemhan dan Kementerian terkait meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan pertahanan Negara, pengembangan sistem belanegara, pengembangan personil belanegara dan pengembangan materiil belanegara.
 - b) Kemenhan, Kementerian lainnya serta Pemprov / Pemkab / Pemkot meningkatkan kekuatan komponen pertahanan Negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemampuan SDA/SDB Nasional dan kemampuan sarana dan prasarana Nasional yang memadai.
 - c) Kemendiknas, Mabes Polri, dan kementerian terkait lainnya mengkoordinasikan pengembangan komitmen wawasan kebangsaan dalam upaya penyelenggaraan pertahanan Negara pada setiap tingkat pendidikan baik formal maupun informal.
 - d) Kemhan, Kemdagri dan kementerian terkait bersama-sama menyusun materi belanegara dalam kurikulum pendidikan formal maupun informal.
- 2) Meningkatkan kemampuan belanegara. Program pendidikan belanegara yang rencana akan dilaksanakan di seluruh wilayah tidak menjadikan pesertanya sebagai kombatan karena setelah dididik, para peserta akan dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat untuk bekerja sebagai rakyat

biasa sesuai dengan profesi dan bidang masing-masing. Mereka bukan tentara, tetapi dalam situasi tertentu dapat dimobilisasi untuk membela Negara. Namun penggunaan warga Negara yang telah didik belanegara akan digunakan untuk kepentingan pertahanan Nir-militer salah satunya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dengan demikian selain untuk kepentingan pertahanan dalam menghadapi ancaman non militer, keberadaan komponen cadangan juga dapat dimanfaatkan dalam keadaan darurat untuk diberdayakan menjadi kekuatan pendukung suatu operasi militer. Upaya nyata dalam meningkatkan program wajib belanegara dilakukan melalui :

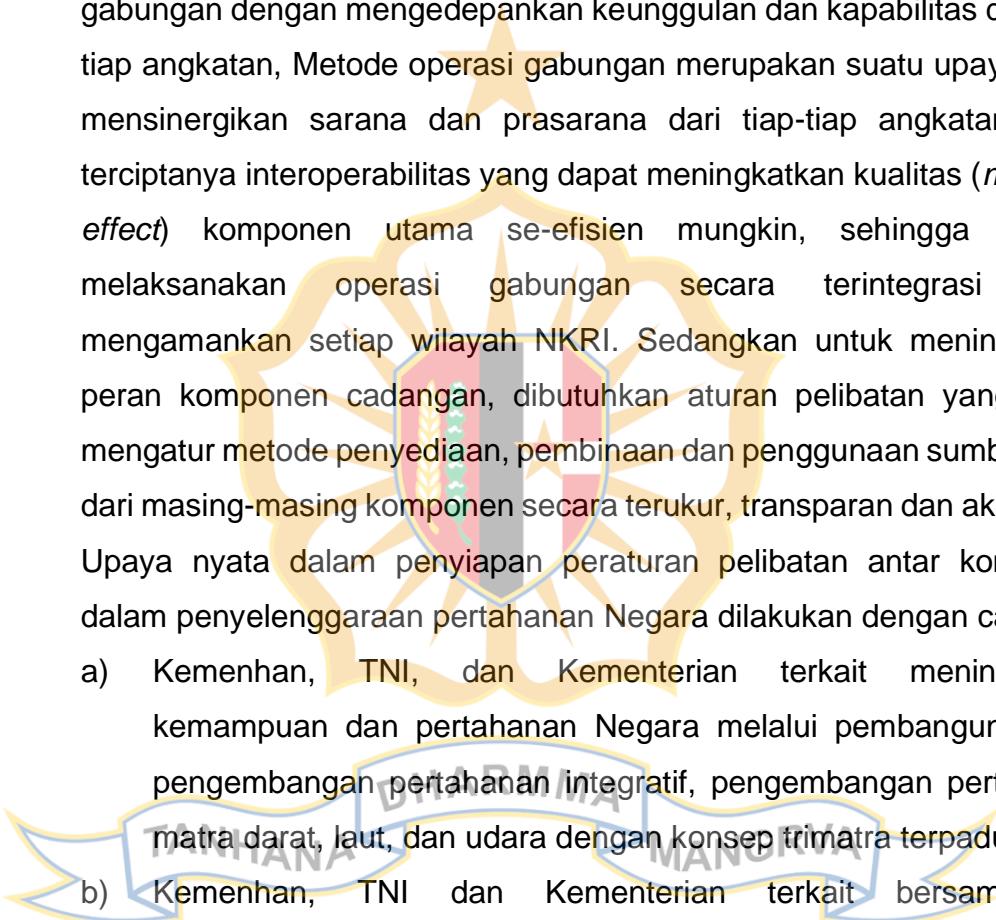
- a) Kemenhan, Mabes Polri, dan kementerian terkait lainnya melakukan pelibatan secara total aparatur pemerintah dan masyarakat dalam upaya belanegara baik secara konsepsional maupun praktikal.
 - b) Mabes Polri, Mabes TNI, dan Jajaran Kodam, serta Polda melaksanakan peningkatan pelatihan Binter TNI dan Binmas Polri dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan belanegara.
 - c) Kemhan, Kemdagri dan Kementerian terkait bersama-sama melaksanakan program wajib belanegara bagi tenaga keamanan baik yang terlibat dalam sektor pemerintah maupun swasta.
 - d) Kemhan, Kemdagri dan Kementerian terkait menyusun program kegiatan belanegara bagi guru dan pengajar sebagai bagian dari program wajib untuk pengenalan penyelenggaraan pertahanan Negara.
- 3) Meningkatkan peran Kementerian / Lembaga diluar pertahanan dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan Negara. Peran komponen cadangan dan komponen pendukung mutlak dibutuhkan untuk menciptakan kesemestaan dalam pelaksanaan pertahanan Negara. Hal ini dikarenakan Sistem pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Begitu pula dengan peran Lembaga lain diluar bidang pertahanan menempatkan

lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman non militer, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan Bangsa. Upaya nyata dalam meningkatkan peran Kementerian / Lembaga diluar pertahanan dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan Negara antara lain dilakukan dengan cara:

- a) Kemenko Polhukam beserta seluruh *stake holder* terkait yang diantaranya meliputi Kemhan, Kemdagri dan Kementerian terkait bersama-sama menyusun kebijakan Nasional yang terpadu antara kebijakan keamanan Nasional, kebijakan ekonomi Nasional, dan kebijakan kesejahteraan Nasional.
 - b) DPR RI, Kemenko Polhukam beserta seluruh *stake holder* terkait yang diantaranya meliputi Kemhan, TNI, Polri, Kemenlu dan kementerian terkait mendorong Lembaga lain untuk bersama-sama merumuskan arah kebijakan keamanan Nasional “*National Security Policy*” sebagai dasar penyusunan aspek keamanan sesuai bidangnya (seperti: *Economic Policy, Foreign Policy, Defence Policy*, dan lain-lain) dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kekuatan pertahanan Negara sebagai sarana untuk meningkatkan posisi tawar dan daya tangkal Negara pada lingkungan Internasional maupun regional, sehingga mampu menjaga ketahanan Nasional serta melindungi kepentingan Nasional.
 - c) Kemenko Polhukam beserta seluruh *stake holder* terkait yang diantaranya meliputi Kemhan, Kemdagri dan Kementerian terkait bersama-sama merumuskan regulasi tentang aturan pelibatan “*role of engagement*” seluruh kementerian dan lembaga dalam rangka menghadapi ancaman yang multi-dimensi (Dimensi *Non-kinetic* atau dimensi non-militer).
- 4) Meningkatkan peran Masyarakat melalui pembentukan desa tangguh. Perubahan sosial perlu dilakukan dengan memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam pertahanan Negara dengan membentuk Forum

masyarakat desa. Forum ini terdiri dari Camat / Lurah, ketua RT / RW, Tokoh masyarakat, Babinsa dan Babinkamtibmas yang membahas permasalahan berkaitan dengan penyiapan desa dalam menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Agar dapat terbentuk forum masyarakat desa, maka upaya yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Kemendagri, Pemerintah daerah, Apkowil setempat, dan Polri menyiapkan SDM Desa Tangguh dengan menentukan peran masing-masing perorangan dalam suatu wilayah. Dalam operasi militer kesatuan komando menjadi sangat penting. Begitu pula dengan penggunaan masyarakat dalam operasi militer. Setiap orang harus memiliki peran masing-masing, sehingga pada saat terjadi kontinjensi perang setiap orang telah mengetahui tugasnya masing-masing. Keterlibatan ini tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi juga oleh perempuan, misalnya dalam hal penyiapan logistik. Dengan demikian, penyiapan personel harus dilakukan bersama-sama dengan kesadaran masing-masing individu.
- b) Kemenhan RI dan Pemerintah daerah menyediakan Sarana dan Prasarana yang memadai. Penyiapan Sarpras sedini mungkin perlu dilakukan agar masyarakat terbiasa dengan Sarpras yang tersedia. Sarpras dapat disediakan oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat. Sarpras juga disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dari segi pendanaan maupun kemampuan dan keterampilan masyarakat. Pada masa damai, Sarpras ini harus dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
- c) Kemenhan RI, Pemda, Apkowil setempat menyiapkan Rencana kontinjensi bersama. Kegiatan ini dibangun untuk membangun cara berfikir masyarakat dalam menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi. Rencana kontinjensi juga dilakukan untuk menghindari kepanikan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya perang. Oleh karena itu, rencana kontinjensi harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing, sehingga masyarakat dapat dengan mudah beradaptasi dengan situasi yang terjadi.

- 
- d) Kemenhan RI, Kemendagri, Pemerintah daerah, dan Apkowil setempat melaksanakan pembinaan secara terus-menerus terhadap desa binaan yang siap menghadapi kontinjensi pada saat Negara dalam keadaan bahaya.
 - 5) Meningkatkan kerjasama antar komponen pertahanan Negara. Untuk meningkatkan peran komponen cadangan sebagai penguat komponen utama, maka perlu adanya regulasi yang mengatur metode operasi gabungan dengan mengedepankan keunggulan dan kapabilitas dari tiap-tiap angkatan, Metode operasi gabungan merupakan suatu upaya untuk mensinergikan sarana dan prasarana dari tiap-tiap angkatan untuk terciptanya interoperabilitas yang dapat meningkatkan kualitas (*multiplier effect*) komponen utama se-efisien mungkin, sehingga mampu melaksanakan operasi gabungan secara terintegrasi untuk mengamankan setiap wilayah NKRI. Sedangkan untuk meningkatkan peran komponen cadangan, dibutuhkan aturan pelibatan yang dapat mengatur metode penyediaan, pembinaan dan penggunaan sumber daya dari masing-masing komponen secara terukur, transparan dan akuntabel. Upaya nyata dalam penyiapan peraturan pelibatan antar komponen dalam penyelenggaraan pertahanan Negara dilakukan dengan cara:
 - a) Kemenhan, TNI, dan Kementerian terkait meningkatkan kemampuan dan pertahanan Negara melalui pembangunan dan pengembangan pertahanan integratif, pengembangan pertahanan tri-matra darat, laut, dan udara dengan konsep trimatra terpadu.
 - b) Kemenhan, TNI dan Kementerian terkait bersama-sama berkoordinasi dalam penyusunan Rencana strategis pengembangan postur pertahanan militer yang diarahkan pada Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force-MEF*) TNI yang lebih aplikatif untuk kebutuhan 15 - 20 tahun kedepan melalui Rematerialisasi; Revitalisasi; Relokasi; dan Pengadaan dalam meningkatkan kemampuan mobilitas dan kemampuan satuan tempur TNI AD, TNI AL, dan TNI AU serta komponen pertahanan Negara lainnya.

- c) Kemenhan dan Kementerian terkait menyusun *Strategic Defense Review* (SDR), Penyusunan manajemen aset sistem pertahanan termasuk alutsista, dan Pengembangan sistem berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi / satuan.
 - d) Kemenhan, Kemdagri, Kementerian terkait dan Pemprov / Pemkab / Pemkot bersama-sama merumuskan pelibatan komponen pertahanan dalam rencana kontinjensi yang melibatkan seluruh komponen pertahanan.
- 6) Membangun kekuatan pertahanan Negara yang terintegrasi antar seluruh komponen pertahanan Negara. Potensi komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan Negara yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat dari belum disyahkannya regulasi sebagai payung hukum penyelenggaranya serta kebijakan dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial (baru mewadahi aspek komponen utama saja). Selain itu, postur pertahanan yang tersedia juga belum mencukupi untuk dapat dijadikan acuan bagi pembangunan kekuatan pertahanan darat, laut, dan udara yang mampu mencegah dan mengatasi ancaman secara lebih efektif. Kurang terbangunnya sinergisme antar Kementerian / Lembaga termasuk pemerintah daerah dalam permasalahan pertahanan Negara serta kurang memadainya sistem dan metoda dalam pembangunan kekuatan pertahanan Negara yang holistic, komprehensif dan integral dengan menitikberatkan keterpaduan dari aspek seluruh komponen. Upaya nyata untuk mewujudkan sinergisme kebijakan strategi antar Kementerian / Lembaga dapat diwujudkan melalui:
- a) Kemenhan, Bapennas, dan Kementerian terkait melaksanakan sinkronisasi dan penajaman kebijakan dan strategi pertahanan dan keamanan, serta penguatan koordinasi dan kerjasama diantara kelembagaan pertahanan dan keamanan serta mengoptimalkan anggaran pertahanan dalam upaya mencapai *minimum essential*

force sesuai dengan rencana waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya untuk dapat ditingkatkan menjadi kekuatan yang masuk dalam kriteria *decisive force*.

- b) Kemenhan, TNI, Kementerian terkait dengan melibatkan Pemprov / Pemkab / Pemkot menyusun *grand design* jangka pendek, menengah dan panjang dalam bentuk peraturan dan perundangan serta strategi pada tataran operasional strategis, operasional sampai dengan peraturan teknis dalam pelaksanaan pembinaan komponen cadangan dan komponen pendukung di wilayahnya masing-masing.
- c) DPR RI, Kemenko Polhukam, Bapennas, Kemenhan dan Kementerian terkait bersama-sama menyusun rencana strategis termasuk didalamnya besaran kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mendukung *road map* tentang penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan Negara.
- d) DPR RI, Kemenko Polhukam, Kemenhan dan Kementerian / Lembaga terkait melaksanakan penajaman sasaran dan sinkronisasi kebijakan dan strategi pertahanan dan keamanan, serta penguatan koordinasi dan kerjasama kelembagaan antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam rangka membangun kekuatan pertahanan Negara yang bersifat kesemestaan.

14. Memperkuat Nasionalisme Bangsa Dalam Mendukung Integrasi Nasional.

Masuknya budaya asing secara langsung maupun tidak langsung telah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebut saja beberapa insiden yang terjadi di lembaga pendidikan dimana siswa tidak mau melakukan penghormatan kepada bendera pada saat upacara penaikan bendera digelar⁵⁴. Padahal tanpa adanya rasa Nasionalisme tentunya tidak akan ada motivasi untuk berjuang meraih kemerdekaan pada masa penjajahan dahulu.

⁵⁴ Siswi di Batam tidak mau hormat Bendera. <https://nasional.tempo.co/read/1278327/kisah-2-siswa-smp-di-batam-tak-mau-hormat-bendera/full&view=ok> diakses pada 5 Juni 2020 pukul 16.30.

Beberapa Negara di dunia, seperti Malaysia, India, dan Pakistan, bahkan menunggu kemerdekaannya diberikan oleh Inggris. Kemerdekaan dengan pemberian tersebut tentunya tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan dan tanpa cucuran darah maupun air mata. Namun sebaliknya, nenek moyang kita lebih memilih untuk berjuang mengangkat senjata melawan penjajah. Paham yang menawarkan kebebasan ini sesungguhnya menempatkan kepentingan individu diatas segalanya yang berdampak pada lunturnya Nasionalisme.

Secara alami, Nasionalisme Bangsa Indonesia mudah sekali dipicu pada saat harga diri Bangsa diusik. Contohnya pada saat Konflik Ambalat, atau konflik apapun yang terjadi di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Tanpa pengaruh dari siapapun, seluruh Bangsa tergerak untuk menegakkan harga diri Bangsa. Gelombang amarah yang senada juga kembali terjadi ketika Tiongkok terus menerus memicu konflik di perairan Natuna yang secara internasional disebut *south china sea*⁵⁵. Nilai-nilai Nasionalisme tersebut tentu saja secara alami lahir dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur Bangsa. Nilai luhur dari Pancasila untuk memupuk rasa Nasionalisme adalah sila ketiga Persatuan Indonesia yang menjadi pondasi bagi tekad Bangsa untuk menjaga NKRI. Terlebih lagi mata pelajaran Pancasila tidak diajarkan lagi disekolah. Hal ini menjadikan penanaman Nasionalisme dari implementasi nilai-nilai Pancasila terabaikan. Dari data dan fakta yang ada, maka dapat diketahui bahwa rasa Nasionalisme Bangsa Indonesia masih rendah. Namun demikian, secara alami Bangsa Indonesia mudah sekali dipicu pada saat harga diri Bangsa diusik.

Dari data dan fakta yang ada, berdampak pada rendahnya tingkat Nasionalisme Bangsa dalam mendukung integrasi Nasional yaitu; 1) Tanpa Nasionalisme yang kuat, maka tingkat partisipasi masyarakat menjadi rendah. Partisipasi merupakan suatu bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran. Semakin banyak orang yang menjadi peserta aktif dan semakin lengkap partisipasinya, semakin ideal kepemilikan dan proses

⁵⁵ Pelanggaran wilayah di Perairan Natuna <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna> diakses pada 5 Juni 2020 pukul 16.30.

masyarakat serta proses inklusif yang akan diwujudkan. Rendahnya tingkat Nasionalisme juga pada akhirnya menurunkan tingkat partisipasi masyarakat secara kolektif; 2) Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu kejiwaan dari kesetiaan seseorang secara total yang diabdikan langsung kepada Negara dan Bangsa. Dengan demikian, rendahnya tingkat Nasionalisme akan menyulitkan dalam upaya untuk menyatukan beberapa perbedaan, karena Nasionalisme lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan; dan 3) Kewajiban setiap warga Negara dalam melaksanakan pertahanan Negara dapat diwujudkan secara aktif sebagai bagian dari rasa Nasionalisme yang tumbuh dalam jiwa seluruh rakyat Indonesia. Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Nasionalisme akan mengurangi kesadaran pribadi untuk melaksanakan kewajibannya kepada Negara dalam bidang pertahanan. Pada akhirnya identitas Bangsa menjadi luntur bahkan hilang dan akan menambah kompleksitas dalam perwujudan Nasionalisme.

Faktor penyebab rendahnya tingkat Nasionalisme Bangsa dalam mendukung integrasi Nasional adalah sebagai berikut; 1) Kurangnya penghargaan untuk ikut berpartisipasi. Orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan pada tingkat individu. Orang-orang akan merasa bahwa partisipasi masyarakat akan menghasilkan sesuatu, tetapi hal ini akan mengakibatkan munculnya pemikiran bahwa orang lain akan mampu mengerjakannya, sehingga partisipasi dirinya tidak diperlukan. Pada tingkatan ini diperlukan bahwa berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai; 2) Kurangnya dukungan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Hal ini berarti bahwa seringkali dalam suatu kegiatan, partisipasi masyarakat dibatasi oleh golongan tertentu yang berdampak pada beberapa bagian dari masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara optimal, meskipun mereka sangat menginginkan untuk berpartisipasi; 3) Seseorang dikatakan telah menggunakan haknya, bila orang tersebut terlibat dalam proses untuk mempengaruhi keputusan serta kesimbangan kekuasaan. Hal ini akan melahirkan demokrasi partisipatif yaitu semua orang akan dapat secara aktif terlibat dalam semua keputusan yang harus dibuat; 4) Orang akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut

penting. Cara ini dapat secara efektif dicapai jika rakyat sendiri telah mampu menentukan isu bukan berasal dari orang luar yang memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Hal ini membutuhkan rumusan isu yang dipahami oleh seluruh rakyat, sehingga menjadi bagian dari isu individu; 5) Masuknya budaya asing yang melunturkan budaya Bangsa untuk saling tolong menolong dan gotong royong. Budaya asing yang masuk secara langsung maupun tidak langsung telah berpengaruh terhadap budaya Bangsa. Nilai-nilai yang tertanam sejak dahulu dianggap kuno oleh kalangan muda, pada akhirnya luntur bahkan hilang dalam kehidupan masyarakat Indonesia; dan 6) Sistem Pendidikan di Indonesia yang lebih mengedepankan teori dalam pembelajaran daripada penanaman nilai langsung dilapangan. Pendidikan di Indonesia lebih mengedepankan pada konsep *knowing* dan bukan *being*. Anak-anak mengetahui bahwa membuang sampah harus pada tempatnya, budaya mengantri, menyeberang jalan pada tempatnya, dan lain sebagainya. Namun mereka tidak diajarkan untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya nilai-nilai tersebut tidak membudaya dalam kehidupan masyarakat.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dimana konstelasi geografis sebagai negara kepulauan yang terletak pada posisi silang, merupakan keunggulan komparatif Negara Indonesia yang bisa digunakan sebagai posisi tawar dalam rangka memperkuat imunitas bangsa untuk mendukung kepentingan nasional Bangsa Indonesia. Sumber kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Dengan demikian semakin besar pendapatan Negara, maka akan semakin besar pula pemerintah mengalokasikan dana bagi pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional tersebut pada akhirnya akan menurunkan ketimpangan antara si kaya dan si miskin yang pada akhirnya dapat memperkecil konflik yang terjadi di Indonesia sebagai salah satu penghambat dalam memperkuat imunitas Bangsa. terwujudnya kekuatan riil pertahanan negara.

Terkait dengan data dan fakta serta peluang dari perkembangan lingkungan strategis tersebut di atas, maka sangat relevan bila diterapkan teori

Nasionalisme yang menyatakan bahwa Nasionalisme dapat didefinisikan sebagai suatu keyakinan atau ideologi politik yang melibatkan atau mengikatkan individu kepada suatu Bangsa (nation)⁵⁶. Dengan demikian, maka salah satu karakter atau elemen utama dalam Nasionalisme adalah identitas sebagai suatu Bangsa.

Solusi untuk memperkuat Nasionalisme Bangsa dalam mendukung integrasi Nasional, sebagai berikut :

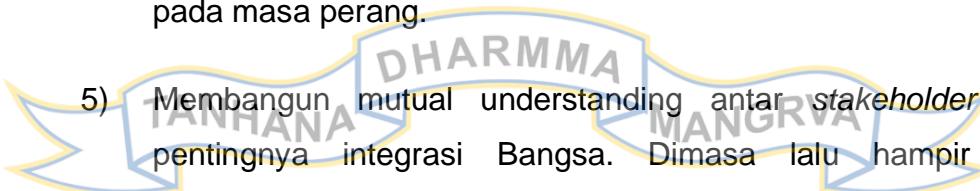
- 1) Restorasi pelaksanaan gerakan kepramukaan sebagai bagian dari penanaman nilai-nilai kebangsaan. Pramuka di Indonesia sering diartikan sebagai “merah putih berjalan”. Hal ini dapat dilihat dari kacu merah-putih yang digunakan dalam seragam Pramuka. Namun seiring dengan waktu hal ini mulai dihilangkan. Nilai filosofis dari penggunaan kacu merah putih dalam seragam pramuka mulai hilang. Belum lagi penanaman nilai-nilai kebangsaan yang semakin jauh dari nilai-nilai Bangsa Indonesia, sehingga gerakan Pramuka baru pada tingkatan pemakaian seragamnya saja. Padahal gerakan kepramukaan dapat dijadikan embrio dalam mencetak kader-kader belanegara dimasa yang akan datang.
- 2) Memasukkan materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum pendidikan. Materi ini sangat penting dipahami oleh para generasi muda sejak dini agar kecintaan terhadap tanah air dapat diterima sejak usia dini. Namun demikian, materi ini tidak boleh bersifat dogmatis yang hanya untuk kepentingan prestasi. Materi wawasan kebangsaan harus menggunakan pendekatan “being” daripada “knowing”. Oleh karena itu materi wawasan kebangsaan harus dalam format aplikatif di Lapangan, sehingga akan tertanam dalam jiwa setiap insan Indonesia.
- 3) Mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Keliling (Siskamling) di setiap Wilayah. Keterlibatan masyarakat dalam operasi territorial

⁵⁶ Muhammad A.S. Hikam, 2016. Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia membendung Radikalisme, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, Hal 49.

merupakan suatu keniscayaan. Pada zaman kemerdekaan, peran masyarakat tersebut sangat dibutuhkan khususnya untuk mengetahui orang-orang yang mungkin dimanfaatkan oleh musuh. Dengan adanya siskamling, masyarakat dapat melakukan cegah dini dan lapor dini. Hal ini juga merupakan salah satu nilai yang dikembangkan dalam latihan belanegara yaitu memiliki kemampuan intelijen dasar. Oleh karena itu pelaksanaan Siskamling juga harus disiapkan dengan baik agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan optimal.



- 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang memadai. Penyiapan Sarpras sedini mungkin perlu dilakukan agar masyarakat terbiasa dengan Sarpras yang tersedia. Sarpras dapat disediakan oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat. Sarpras juga disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dari segi pendanaan maupun kemampuan dan keterampilan masyarakat. Pada masa damai, Sarpras ini harus dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh peralatan masyarakat dapat digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan warga yang hajatan. Hal ini juga akan mendorong masyarakat untuk bekerja sama dalam menghadapi setiap permasalahan baik pada masa damai maupun pada masa perang.
- 5) Membangun mutual understanding antar *stakeholder* tentang pentingnya integrasi Bangsa. Dimasa lalu hampir seluruh *stakeholder* memahami tentang pentingnya kepentingan Nasional. Kepentingan Nasional tersebut dibangun atas musuh bersama sesuai dengan zamannya. Hal ini juga dapat tercapai karena seluruh pimpinan pada masa itu memiliki pemahaman yang sama tentang *common enemy* tersebut. Oleh karena itu, para *stakeholder* masa kini juga harus memiliki pemahaman yang sama tentang integrasi Bangsa dalam menghadapi setiap ancaman, sehingga melahirkan satu pandangan yang menyeluruh dan dapat dijadikan pemersatu di



dalam lingkup yang paling kecil yaitu keluarga dan kelompoknya dan lingkup yang besar yaitu pada tingkat Negara.

- 6) Melaksanakan sosialisasi tentang integrasi Nasional yang telah dibangun. Hal ini penting dilakukan agar seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang sama akan hal tersebut. Membangun pemahaman yang sama akan suatu hal apalagi yang dijadikan sebagai *common enemy* tidaklah mudah, oleh karena itu diperlukan peran seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaannya. Disinilah peran kelembagaan diperlukan untuk kepentingan keamanan dalam lingkup luas. Keamanan dalam arti luas tidak hanya menjadi *leading sector* TNI tetapi juga seluruh komponen Bangsa lainnya. Setelah disosialisasikan dilakukan langkah-langkah untuk memantapkan integrasi Nasional sejak usia dini. Karena pentingnya hal tersebut, maka penanaman tentang hal ini tidak dapat dilakukan secara dogmatis seperti masa lalu, tetapi melalui kegiatan-kegiatan yang interaktif serta peran seluruh komponen Bangsa lainnya agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan efektif.

15. Memperkuat Diplomasi Pertahanan Dalam Mendukung Integrasi Nasional.

Peran TNI dalam diplomasi pertahanan merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini dikarenakan kekuatan TNI yang besar dapat dijadikan posisi tawar sekaligus sebagai efek daya tangkal yang tangguh dari potensi ancaman. Diplomasi pertahanan yang dilakukan saat ini dengan mengirimkan pasukan dalam misi perdamaian. Namun demikian, jumlah pasukan yang dikirim dalam misi perdamaian dari tahun ke tahun belum mencukupi target yang ditentukan. Meskipun di ASEAN, Indonesia merupakan Negara yang paling banyak mengirimkan personelnya ke dalam misi PBB, namun belum memenuhi target yang ditentukan. Sampai dengan April 2020 terdapat 2.847 personel yang

ditugaskan dalam misi PBB⁵⁷. Presiden Jokowi sendiri menargetkan sejumlah 4.000 personel pasukan yang dapat dikirim dalam operasi perdamaian⁵⁸. Dengan terbatasnya jumlah personel yang dikirimkan akan berpengaruh terhadap kemampuan diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia. Belum lagi dihadapkan pada kualitas personel dan posisi jabatan yang dikirimkan pada operasi perdamaian. Saat ini Indonesia belum memiliki personel yang menduduki jabatan strategis dalam operasi perdamaian.

Diplomasi pertahanan dalam menyelesaikan sengketa *Flight Information Region* (FIR) sejauh ini masih belum berhasil mengembalikan pengelolaan wilayah udara Indonesia seutuhnya. Diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa FIR di Kepulauan Natuna dengan Singapura adalah dengan menggunakan diplomasi *Joint Management* dimana diadakannya pengelolaan bersama antara Indonesia dengan Singapura dengan wujud *good neighbouring* dan *win-win solution*. Ditandai dengan adanya kerjasama pelatihan militer di Kepulauan Natuna dan pengumpulan hasil dari RANS Charges dan diberikan kepada Indonesia⁵⁹.

Disisi lain, konsep politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, politik luar negeri, serta peraturan perundang undangan dan hukum internasional⁶⁰. Prinsip bebas aktif tersebut dilaksanakan melalui diplomasi yang aktif dan antisipatif. Bebas aktif juga tidak diartikan netral melainkan politik luar negeri yang bebas dalam menentukan sikap dan kebijakan terhadap persoalan internasional. Kebebasan dalam bersikap inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan sebagai bagian dari diplomasi Negara.

⁵⁷ UN Peacekeeping Operation. Jumlah personel dalam operasi perdamaian <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/06/12/indonesia-menjadi-negara-dengan-jumlah-personil-pasukan-perdamaian-pbb-terbanyak-di-asean> diakses pada 27 Juni 2020 pukul 10.45.

⁵⁸ Presiden Joko Widodo. Target jumlah pasukan kontingen PBB. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01300775/pasukan-penjaga-perdamaian-asal-indonesia-hampir-4000-orang-kontingen-garuda> diakses pada 27 Juni 2020 pukul 10.45.

⁵⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/33119-ID-diplomasi-indonesia-dalam-menyehlesaikan-sengketa-fir-flight-information-region-d.pdf>. Diunduh tanggal 27 Juni 2020 pukul 20.45

⁶⁰ Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 2 dan 5

Posisi tawar militer sebagai instrumen diplomasi akan sangat tergantung dari kapasitas dan kapabilitas TNI saat ini.

Dari segi kemampuan dihadapkan pada tugas diplomasi pertahanan juga belum optimal baik dari segi personil maupun strategi. Keterbatasan bahasa dan wawasan menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan tugas diplomasi. Begitupula dari sisi strategi, TNI perlu merumuskan kembali strategi yang komprehensif dalam diplomasi. Kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh TNI dalam pelaksanaanya belum tersusun dalam satu strategi diplomasi yang utuh. Pelaksanaan diplomasi yang dilakukan oleh masing-masing Angkatan masih dilaksanakan secara sendiri-sendiri tanpa strategi yang jelas. Pelaksanaan diplomasi yang dilakukan oleh TNI masih terkesan sebagai rutinitas program tanpa adanya target capaian tertentu seperti layaknya suatu strategi.

Dari data dan fakta yang ada, berdampak pada belum optimalnya diplomasi pertahanan dalam mendukung integrasi Nasional yaitu; 1) Penguasaan suatu Bangsa atas Bangsa lain selalu dilakukan oleh Negara yang kekuatannya lebih besar kepada Negara lainnya yang lebih lemah. Ketika sebuah Negara dianggap kuat oleh Negara lain, maka kecenderungan untuk diinvasi akan menjadi kecil, inilah yang kemudian disebut sebagai daya tangkal pertahanan *“deterrent effect”*. Kekuatan pertahanan Negara sering dijadikan sebagai bagian dari diplomasi pertahanan. Dengan demikian maka, kekuatan pertahanan suatu Negara menjadi faktor penentu seberapa tinggi tingkat kemampuan daya tangkalnya. Kemampuan daya tangkal suatu Negara juga perlu didukung oleh keberhasilan diplomasi preventif yang memadai karena diplomasi sangat diperlukan untuk meraih dukungan, pengakuan dan menghindarkan terjadinya alienasi suatu Bangsa atau Negara; 2) Keberhasilan diplomasi juga ditentukan oleh ada atau tidaknya posisi tawar yang dimiliki oleh Bangsa tersebut. Dewasa ini tidak satupun Bangsa atau Negara di dunia ini bisa menjadi kuat tanpa dukungan dari lingkungan sekitarnya baik dalam bentuk persekutuan ataupun kerjasama bilateral / multilateral. Realitas ini memberi kendala terhadap keikutsertaan masyarakat dalam melakukan diplomasi sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Hal ini merupakan realitas tentang bagaimana belum optimalnya diplomasi pertahanan

berdampak pada perwujudan kesepakatan terhadap norma yang berlaku yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kewaspadaan Nasional; dan 3) Belum optimalnya diplomasi pertahanan berdampak pada terwujudnya konsistensi terhadap norma sosial yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari sikap apriori masyarakat terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat tidak menyadari bahwa apa yang mereka perbuat baik di dalam maupun di luar negeri merupakan bagian dari diplomasi yang dilakukan oleh Bangsa secara keseluruhan. Lihat saja dampak dari kriminalitas yang dilakukan oleh salah satu warga Negara Indonesia di London yang telah mencoreng nama baik Indonesia di kancah internasional.

Faktor belum optimalnya diplomasi pertahanan dalam mendukung integrasi Nasional adalah sebagai berikut; 1) Belum optimalnya pendidikan dan latihan dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel. Dari segi kapabilitas atau kemampuan yang mengarah pada tugas diplomasi, secara terbuka diakui bahwa TNI juga belum memiliki kemampuan yang cukup baik dari segi personil maupun dari segi strategi. Dari segi personil, disadari bahwa personil TNI masih belum memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan dalam bidang diplomasi. Keterbatasan bahasa dan wawasan menjadi penghambat dominan dalam melaksanakan tugas diplomasi; 2) Hubungan antar kelembagaan belum sinergi khususnya dengan kementerian Luar Negeri. Belum adanya pemahaman yang sama bahwa duta besar merupakan kepala perwakilan yang bertugas sebagai head of mission dan mengendalikan pelaksanaan tugas diplomasi di Negara akreditas. Masih ada anggapan bahwa duta besar merupakan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, padahal duta besar adalah perwakilan dari Negara untuk menjalankan tugas diplomasi Negara; 3) Kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki TNI masih terbatas dikaitkan pada pelibatannya dalam diplomasi total Negara. Dalam penyusunan *mission paper* baik oleh Kementerian Luar Negeri maupun TNI belum dilaksanakan secara terkoordinasi. *Mission paper* merupakan panduan pelaksanaan diplomasi di suatu Negara yang berisi prioritas sasaran serta strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan diplomasi. Penyusunan *mission paper* untuk kepala perwakilan masih dilakukan oleh calon duta besar dan belum dilakukan oleh Kementerian Luar

Negeri sehingga *mission paper* tersebut tidak tercapai. Namun, yang lebih disayangkan lagi, Atase Pertahanan RI sebagian besar, jika tidak seluruhnya, tidak memiliki *mission paper* sebagai panduan pelaksanaan tugas diplomasi; 4) Belum tersedianya grand disain dalam peningkatan kemampuan diplomasi. Saat ini, kapasitas yang dimiliki oleh TNI masih jauh dari harapan untuk dapat mengemban tugas diplomasi militer dengan target dapat mempengaruhi atau merubah kebijakan Negara sasaran TNI belum memiliki sarana yang mewadahi dalam melakukan diplomasi militer seperti kelengkapan persenjataan dan Alutsista serta dukungan anggaran yang ideal. Posisi tawar militer sangat bergantung pada kuatnya militer tersebut terutama ditinjau dari segi kelengkapan peralatan perang.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dengan dinamika perkembangan keamanan di kawasan Asia Pasifik dengan rivalitas Cina dengan Amerika Serikat. Apabila terjadi peningkatan eskalasi, maka minimal Indonesia akan merasakan limpahan “spill over” konflik atau bahkan kemungkinan akan terjadi penggiringan Indonesia sebagai *war theater* sehingga Indonesia dapat mengambil peranan yang signifikan sebagai negara yang dapat menginisiasi terjadinya perdamaian di kawasan ini

Terkait dengan data dan fakta serta peluang dari perkembangan lingkungan strategis tersebut di atas, maka sangat relevan bila diterapkan teori diplomasi pertahanan yang menyatakan bahwa dalam konteks kerja sama pertahanan akan dikembangkan sebagai salah satu instrumen diplomasi dalam mewujudkan rasa saling percaya melalui bidang pertahanan. Sejalan dengan itu, diplomasi pertahanan akan lebih diefektifkan melalui langkah-langkah yang lebih konkret, aktif, dan bermartabat. Kerja sama pertahanan diarahkan bagi terwujudnya kawasan yang damai dan stabil melalui upaya bersama antarnegara serta menjunjung tinggi hak kedaulatan negara masing-masing. Solusi untuk memperkuat diplomasi pertahanan dalam mendukung integrasi Nasional adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan peran lembaga non pemerintah berbasis pada penelitian dan pengembangan. Salah satu wujud nyata partisipasi komponen masyarakat dalam upaya penyelenggaraan Hanneg adalah peran serta aktif lembaga non pemerintahan yang berbasis

pada penelitian dan pengembangan yang memiliki fungsi memberikan kajian-kajian kepada pemerintah meliputi konsep, tantangan, perkembangan lingkungan strategis Negara secara komprehensif dan aktual. Setiap kajian strategis akan menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pertahanan Negara khususnya penyusunan regulasi dan penataan sumber daya yang dapat dioptimalkan. Upaya nyata dalam meningkatkan peran lembaga non pemerintah dalam penyelenggaraan Hanneg dilaksanakan melalui:

- a) Kemendiknas, Mabes Polri, dan Kementerian terkait lainnya melaksanakan penataran kewaspadaan Nasional tentang potensi ancaman baik militer maupun nir-militer kepada seluruh lapisan masyarakat.
 - b) Kemenko Polhukam bersama *stake holder* terkait, Kemhan, Kemdagri dan Kementerian terkait mendorong dan mewujudkan Implementasi penyelenggaraan pertahanan Negara melalui peran aktif masyarakat, LSM, dan instrument Negara dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - c) Kemenhan, Kemendagri dan LSM bersama-sama melaksanakan latihan dan simulasi dalam menghadapi kontinjensi kemungkinan ancaman.
 - d) Kemenhan, Kemendagri, Kementerian terkait dan LSM bersama-sama melaksanakan seminar tentang peran komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pertahanan Negara.
- 2) Untuk memperkuat diplomasi pertahanan agar dapat terwujud kesepakatan antar kelompok, maka perlu dibangun integrasi antar komponen pertahanan Negara. Untuk meningkatkan peran komponen pertahanan Negara, dibutuhkan aturan pelibatan yang dapat mengatur metode penyediaan, pembinaan dan penggunaan

sumber daya dari masing-masing komponen secara terukur, transparan dan akuntabel. Upaya nyata dalam penyiapan peraturan pelibatan antar komponen dalam penyelenggaraan pertahanan Negara dilakukan dengan cara:

- a) Kemenhan, TNI, dan Kementerian terkait meningkatkan kemampuan dan pertahanan Negara melalui pembangunan dan pengembangan pertahanan integratif, pengembangan pertahanan matra darat, laut, dan udara dengan konsep trimatra terpadu.
 - b) Kemenhan, TNI dan Kementerian terkait bersama-sama berkoordinasi dalam penyusunan Rencana strategis pengembangan postur pertahanan militer yang diarahkan pada Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force-MEF*) TNI yang lebih aplikatif untuk kebutuhan 15-20 tahun kedepan melalui Rematerialisasi; Revitalisasi; Relokasi; dan Pengadaan dalam meningkatkan kemampuan mobilitas dan kemampuan satuan tempur TNI AD, TNI AL, dan TNI AU serta komponen pertahanan Negara lainnya.
 - c) Kemenhan dan Kementerian terkait menyusun *Strategic Defense Review (SDR)*, Penyusunan manajemen aset sistem pertahanan termasuk alutsista, dan Pengembangan sistem berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan.
 - d) Kemenhan, Kemendagri, Kementerian terkait dan Pemprov/Pemkab/Pemkot bersama-sama merumuskan pelibatan komponen pertahanan dalam rencana kontinenksi yang melibatkan seluruh komponen pertahanan.
- 3) Meningkatkan kemampuan diplomasi pertahanan tidak terlepas dari peningkatan kemampuan seluruh komponen pertahanan Negara. Mengantisipasi semua perkembangan yang terjadi di dunia, organisasi-organisasi militer di berbagai penjuru dunia saat ini terus mencari metode-metode baru untuk meningkatkan kemampuan

menghadapi bentuk-bentuk perang baru yang lahir sebagai akibat dinamika perkembangan lingkungan strategis global maupun regional. Salah satu solusi untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan membangun kemampuan *smart power* yang merupakan kolaborasi antara *soft power* dan *hard power* secara komprehensif. Agar peningkatan diplomasi pertahanan dapat diwujudkan secara konsisten dengan pendekatan *smart power*, maka upaya nyata yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Kemenhan, Kementerian terkait, TNI, dan BIN bersama-sama mewujudkan Intelijen yang memiliki integritas terpercaya dan kemampuan yang andal melalui peningkatan keseimbangan pembangunan aset intelijen yang didukung dengan pembangunan Pusat Informasi Intelijen dengan memanfaatkan IT secara terpadu oleh seluruh badan intelijen dari tingkat strategis sampai dengan operasional di lapangan.
- b) Kemenhan, Kemenkominfo dan Kementerian terkait bersama-sama meningkatkan *cybercrimes awareness* melalui peningkatan kemampuan SDM dan penguatan struktur Cyber di setiap Kotama operasional. Selain itu dalam rangka menghadapi *Network Centric Warfare* perlu pemanfaatan sarana gelombang elektromagnetik dan saluran transmisi data digital yang memanfaatkan OSI (*open system interconnection*) sebagai sarana dalam mengintegrasikan seluruh sistem yang ada.
- c) Kemenhan, Kemenkumham dan Kementerian terkait bersama-sama menyusun legalitas dalam peningkatan peran psikologi dalam penggunaan kekuatan TNI meliputi pengamanan, melawan aksi terorisme, dukungan penugasan pasukan pemeliharaan perdamaian, operasi kemanusiaan, dan operasi psikologi dalam rangka menciptakan opini, Perang Urat Syaraf (PUS) maupun operasi psikologi dalam melakukan penggalangan pada suatu daerah tertentu.

- d) Kemenhan, Kemenlu dan Kementerian terkait menjalin hubungan kerja sama yang baik dan sinergis dengan kekuatan Angkatan Bersenjata Negara lain dalam rangka mendukung tercapainya hubungan luar negeri Indonesia melalui peningkatan kemampuan personel dengan kemampuan diplomasi pertahanan / *defence diplomacy*, peningkatan peran TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB baik secara kuantitas dan kualitas serta penempatan personel pada jabatan strategis di badan-badan PBB.
- 4) Membangun sistem dukungan dalam memperkuat diplomasi pertahanan secara efektif dan efisien. Pembangunan sistem dukungan masih berorientasi pada pengembangan kekuatan TNI dalam bidang operasi baik OMP maupun OMSP. Kemampuan dukungan sebagai pengganda kemampuan operasional belum dilakukan dengan optimal. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem dukungan yang mampu melakukan pembinaan kemampuan dan pembinaan terhadap diplomasi pertahanan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Upaya nyata dalam membangun kemampuan dukungan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Kemenhan, Bappenas, dan Kementerian terkait bersama-sama merumuskan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personel yang ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan dukungan kesehatan personel secara bertahap. Pemenuhan kebutuhan dasar mencakup penentuan standar kelayakan hidup Prajurit yang ditentukan sesuai dengan tipologi wilayah masing-masing.
 - b) Kemenhan dan Kementerian terkait menyusun sistem logistik yang komprehensif dalam pengadaan Alut / Alutsista serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh seluruh komponen pertahanan Negara mulai dari perencanaan, pengadaan,

penggudangan / distribusi, pemeliharaan sampai dengan penghapusan.

- c) Kemenhan dan instansi terkait mengembangkan sistem *Geospasial Information System (GIS)* yang terintegrasi antar lembaga untuk kepentingan pertahanan Negara, sehingga memudahkan dalam pembinaan dan penggunaan sumber daya Nasional.
- d) Kemenhan, Kemendagri, Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah bersama-sama menyiapkan aspek dukungan yang ada di daerah untuk dikembangkan dalam mendukung pertahanan wilayah.



BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan.

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan kajian yang selanjutnya dianalisis didasarkan pada tinjauan teoretis pada bab-bab sebelumnya, maka ditemukan dampak yang terjadi terkait permasalahan yang ada, faktor penyebab dan solusi penyelesaiannya. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa untuk memperkuat imunitas Bangsa dalam mendukung integrasi Nasional, dapat dilakukan dengan tiga (3) cara yaitu memperkuat komponen pertahanan Negara; memperkuat Nasionalisme Bangsa; dan memperkuat diplomasi pertahanan.

Memperkuat komponen pertahanan Negara yang merupakan kekuatan utama dalam menghadapi setiap ancaman yang timbul baik berupa ancaman militer, non militer maupun penggabungan dari keduanya yang disebut dengan ancaman hibrida. Dalam pelaksanaannya memperkuat kekuatan pertahanan Negara harus didukung oleh seluruh stakeholder dikarenakan sistem pertahanan Negara merupakan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh sumber daya Nasional yang disiapkan sejak dini. Penyiapan sejak dini tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh seluruh komponen Bangsa lainnya. Memperkuat komponen pertahanan Negara juga harus didukung dengan ketersediaan regulasi pada tingkatan operasional. Sistem pertahanan Negara yang bersifat semesta dibangun dari integrasi ketiga komponen pertahanan Negara, sehingga membutuhkan regulasi pada tataran operasional untuk bisa mengintegrasikan ketiga komponen pertahanan Negara tersebut. Tanpa adanya regulasi pada tataran operasional, akan sulit untuk bisa menerapkan sistem pertahanan Negara sebagai satu kesatuan. Hal penting lainnya dalam memperkuat komponen pertahanan Negara berkaitan dengan ketersediaan anggaran yang mencukupi. Pembangunan kekuatan komponen cadangan dan pendukung membutuhkan anggaran yang cukup besar dihadapkan kondisi perkeonomian Nasional saat ini. Disisi lain TNI

sebagai komponen utama pertahanan Negara juga masih membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam pengembangan kekuatan TNI.

Memperkuat Nasionalisme Bangsa yang dilakukan tidak hanya dengan cara-cara dogmatis, tetapi juga penanaman nilai-nilai kecintaan terhadap tanah air yang menimbulkan kesadaran bagi seluruh masyarakat. Kesadaran ini akan menimbulkan partisipasi aktif masyarakat untuk melaksanakan belanegara. Tanpa adanya Nasionalisme, maka partisipasi masyarakat dalam upaya belanegara menjadi rendah. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat secara kolektif. Memperkuat Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai totalitas kesetiaan seseorang terhadap Bangsa yang dibangun dari berbagai macam perbedaan suku, agama, dan golongan. Dengan demikian, memperkuat Nasionalisme juga dapat diartikan meningkatkan upaya untuk menyatukan beberapa perbedaan yang mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Memperkuat Nasionalisme juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya Nasionalisme dalam menghadapi dan menangkal setiap ancaman. Oleh karena itu memperkuat Nasionalisme menjadi hal yang sangat penting dalam upaya memperkuat imunitas Bangsa.

Memperkuat diplomasi pertahanan merupakan suatu keniscayaan dalam memperkuat imunitas Bangsa. Diplomasi pertahanan dibangun atas dasar sikap saling percaya antar Negara-Negara sahabat. Sikap ini dibangun dan dikembangkan dalam upaya meningkatkan efek daya tangkal dalam menghadapi setiap ancaman. Namun demikian, keberhasilan diplomasi pertahanan juga sangat ditentukan oleh kemampuan kekuatan Nasional antara lain informasi, militer dan ekonomi. Tanpa dukungan ketiganya, maka diplomasi yang dilakukan kurang memberikan efek daya tangkal yang optimal dalam menghadapi setiap ancaman. Dengan demikian, diplomasi pertahanan digunakan sebagai cara memenangkan kepentingan Bangsa dengan menggunakan kekuatan militer sebagai alat atau sumber daya tanpa harus mengedepankan kekerasan sebagai jalannya. Dalam artian diplomasi pertahanan merupakan proses dalam membangun imunitas Bangsa dihadapkan pada hubungan dengan bangsa lainnya. Dalam membangun

diplomasi pertahanan dibutuhkan kemampuan SDM yang berkualitas, sistem politik luar negeri Indonesia yang efektif, serta strategi diplomasi pertahanan yang disusun dalam suatu disain yang utuh, sehingga mampu memberikan efek daya tangkal yang tangguh untuk kepentingan pertahanan Negara.

17. **Rekomendasi.** Beberapa rekomendasi dalam rangka memperkuat imunitas Bangsa guna mendukung integrasi Nasional, sebagai berikut:

- a. DPR RI, Kemenko Polhukam, Kemenhan, Kemen Hukum dan HAM perlu melakukan percepatan terhadap terwujudnya regulasi terkait dalam pembangunan kekuatan pertahanan Negara yang integral, komprehensif dan holistik dengan menitik beratkan keterpaduan dari aspek seluruh komponen. Hal ini dilakukan dengan menyusun peraturan pemerintah sebagai penjabaran dari Undang-undang yang telah ada saat ini seperti peraturan pemerintah yang mengatur tentang tugas-tugas dalam pelaksanaan operasi militer selain perang. Begitu pula dengan peraturan pemerintah untuk menjabarkan Undang-undang Nomor 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional sebagai landasan operasional dalam pelaksanaannya. Selanjutnya peraturan pemerintah yang telah disusun dapat dilakukan uji publik terhadap sebagai bagian dari *public approval* sehingga mampu memberikan masukan guna mengeliminir terjadinya ketidaksamaan persepsi di lembaga legislatif terhadap peraturan pemerintah yang disusun, sehingga regulasi tersebut dapat dioperasionalkan.
- b. Kemenko Polhukam, Kemenhan dan Kemendagri bersama-sama mendorong tersusunnya kebijakan nasional yang terpadu dalam peningkatan nasionalisme melalui program belanegara yang dapat dilakukan dengan membentuk embrio untuk komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai bagian dari komponen pertahanan Negara. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam menyiapkan SDM dan aparatur Negara dalam penyiapan komponen pertahanan Negara melalui kegiatan belanegara dan peningkatan wawasan kebangsaan yang terintegrasi antara kepentingan

pusat dan kondisi sumber daya Nasional dimasing-masing wilayah, termasuk diantaranya pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai model dasar susunan komponen pendukung sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Menyarankan untuk melakukan adendum terhadap Uundang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga memuat pasal yang mengatur tentang: Kewajiban untuk semua calon ASN melalui proses kegiatan pendidikan dasar belanegara pada proses rekrutmen; Mewajibkan pendidikan belanegara sesuai dengan jenjang kepangkatan dan ruang jabatan bagi seluruh ASN; Menyusun ASN sesuai keahlian dan profesi dalam suatu organisasi bala tentara cadangan matra darat, matra laut dan matra udara.

- c. Kemenhan, Kemenlu dan TNI mendorong tersusunnya grand disain strategi diplomasi pertahanan yang melibatkan seluruh stakeholder terkait agar diplomasi pertahanan tidak hanya berkaitan dengan TNI saja, karena didalamnya akan menyangkut persoalan pertahanan nirmiliter yang melibatkan lembaga pemerintah diluar institusi pertahanan sebagai unsur utamanya. Penyusunan grand disain ini dilakukan dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga sebagai *leading sector* sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam diplomasi pertahanan yang dibangun sebagai bagian dari upaya penangkalannya.
- d. Kemenhan mendorong dilakukannya kajian akademis dalam rangka pembentukan Badan / Lembaga Nasional yang memiliki tugas pokok menangani tata kelola, koordinasi dan sosialisasi terkait dengan Sishanta dan komponen pertahanan Negara ke depan, dimana Badan / Lembaga Nasional tersebut berkedudukan langsung dibawah Presiden, seperti; BPIP dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Andrianto, Irjen Pol, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarhakam) Polri, Konflik sosial di Indonesia. Diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/1285460/mabes-polri-catat-ada-26-konflik-sosial-sepanjang-2019/full&view=ok>. Pada 1 Juni 2020 pukul 15.00
- Alida Tomja, "Polarity and International System Consequences", Interdisciplinary Journal of Research and Development, Vol. I, No. 1, 2014, Hal 58-59
- Anggaran Kementerian pertahanan tahun 2020. Diakses dari: <https://katadata.co.id/berita/2019/10/23/prabowo-pimpin-kementerian-pertahanan-dengan-anggaran-terbesar-di-2020> diakses pada 5 Juni 2020 pukul 14.30.
- Anggaran pertahanan Singapura <https://kabar24.bisnis.com/read/20190330/15/906297/cek-fakta-prabowo-sebut-anggaran-pertahanan-singapura-30-persen-dari-apbn-ini-faktanya> diakses pada 5 Juni 2020 pukul 14.30.
- Asing–kuasai–85–persen–migas–indonesia. Diakses dari: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/94508> Pada 4 Juli 2020 pukul 22.00
- Astawa, I.P.A., 2017. Integrasi Nasional. Materi Kuliah Kewarganegaraan Universitas Udayana. Hal. 11
- Anggaran Pertahanan 2020. Diakses dari: <https://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp>. Pada 17 Juni 2020 pukul 06.38
- Bondan Tiara Sofyan, Dirjen Pothan. Pembentukan Batalyon Komcad. Diakses dari: <https://www.beritasatu.com/nasional/601575-kemhan-akan-bentuk-100-batalion-komponen-cadangan>: Pada 27 Juni 2020 pukul 10.00
- Budyanto Putro Sudarsono, Jonni Mahroza, dan Surryanto D.W. 2018. Diplomasi pertahanan indonesia dalam mencapai kepentingan Nasional. Jurnal pertahanan dan bela Negara volume 8 nomor 3
- Lemhannas RI. 2020. Bahan Ajaran Bidang Studi Kewaspadaan Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan LX Lemhannas RI tahun 2020

Dahnil Anzar Simanjuntak, Jumlah Ideal Prajurit TNI. Diakses dari: <https://rakyatrukun.com/dahnil-anzar-simanjuntak-urgensi-komponen-cadangan-tni/>. Pada 27 Juni 2020 pukul 10.00

Diplomasi-indonesia-dalam-menyeleaskan-sengketa-fir-flight-information-region-.pdf. Diakses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/33119-ID>. Pada 27 Juni 2020 pukul 20.45

Fragile States Index, Diakses dari: <http://fundforpeace.org/fsi/country-data/>, Pada 21 Mei 2020 pukul 14.17

Heru Winarko, Kepala BNN Penyalahgunaan peredaran-narkotika-semakin-meningkat. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/> pada 3 Juni 2020 pukul 14.17

Kim Fletcher, Marcus Marktanner, and Luc Noiset. May 2013. Developing a Conflict Vulnerability Index. ICAT Working Paper Series

Kekuatan militer Indonesia tahun 2020. Diakses dari: https://www.globfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=indonesia. Pada 17 April 2020 pukul 19.00

Kekuatan militer Indonesia tahun 2019. Diakses dari: <https://www.goriau.com/berita/baca/skor-kekuatan-militer-negaranegara-dunia-tahun-2019-indonesia-posisi-ke-berapa.html>. Pada 17 April 2020 pukul 19.00

Jumlah suku Bangsa di Indonesia. Diakses dari: <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>. Pada 1 Juni 2020 pukul 21.00

Jenderal TNI (Purn) Mulyono, Imunitas Bangsa. Diakses dari: <https://news.detik.com/ kolom/d- 3708695/ menjaga-imunitas-bangsa>. Pada 9 Mei 2020 pukul 09.00

Lukman Nul Hakim, 2019. Meminimalisasi Konflik Antara Pendukung Dua Kubu Calon Presiden Dalam Pilpres 2019. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Muhammad A.S. Hikam, 2016. Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia membendung Radikalisme, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, Hal 49.

Menjaga imunitas Bangsa. Diakses dari: <https://news.detik.com/kolom/d-3708695/menjaga-imunitas-bangsa>. Pada 9 Mei 2020 pukul 09.50

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Buku Putih Pertahanan, Hal 81

Pengetian imunitas. Diakses dari: <https://jagokata.com/arti-kata/imunitas.html>. Pada 30 Mei 2020 pukul 20.30

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2002, tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia

Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas dengan topik Optimalisasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden Joko Widodo, Jumlah suku dan Bahasa di Indonesia Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-4490647/jokowi-sebut-ri-punya-714-suku-dan-lebih-dari-1100-bahasa-ini-faktanya>. Pada 27 Juni 2020 pukul 15.00

Presiden Joko Widodo. Target jumlah pasukan kontingen PBB. Diakses dari: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01300775/pasukan-penjaga-perdamaian-asal-indonesia-hampir-4000-orang-kontingen-garuda>. Pada 27 Juni 2020 pukul 10.45.

Pengertian Integrasi Nasional. Diakses dari: <https://thegorbalsla.com/integrasi-nasional/>. Pada 31 Mei 2020 pukul 20.00

Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia. Hal 32

Pemotongan anggaran Kementerian dan Lembaga. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/06460991/jokowi-potong-anggaran-kementerian-lembaga-demi-covid-19-berikut-rinciannya>. Pada 27 Juni 2020 pukul 09.30.

Pelanggaran wilayah di Perairan Natuna. Diakses dari: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna>. Pada 5 Juni 2020 pukul 16.30.

Pertumbuhan ekonomi pasca pandemic Corona. Diakses dari: <https://www.suaramerdeka.com/news/opini/225802-ekonomi-di-masa-pandemi-covid-19>. Pada 14 Juni 2020 pukul 20.00

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Diakses dari: <https://bisnis.tempo.co/read/1303775/penyebab-pertumbuhan-ekonomi-2019-turun-jadi-502-persen>. Pada 13 Juni 2020 pukul 20.00

Radikalisme masuk ke lingkungan Pendidikan. Diakses dari: <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/01/11/174435/mewaspadai-gerakan-radikalisme-di-indonesia>. Pada 6 Juni 2020 pukul 09.00

Sudiono, Janti. 2014. Sistem Kekebalan Tubuh. Jakarta: EGC Hal. 2

Sejumlah - teror - yang - guncang - indonesia - bom - bunuh - diri - hingga?page=all diakses pada 2 Juni 2020 pukul 21.00

Sunardi, R.M., 2004, Pembinaan Ketahanan Nasional (Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia), Jakarta : PT. Kuaternita

Siswi di Batam tidak mau hormat Bendera. Diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/1278327/>. Pada 5 Juni 2020 pukul 16.30.

Sambutan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Diakses dari: <https://kicaunews.com/2018/12/06/panglima-tni-membangun-imunitas-bangsa/> Pada 9 Mei 2020 pukul 09.20.

Teror di Sibolga. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/25/07485601/kaleidoskop-2019>. Pada 7 Juni 2020 pukul 19.30.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pasal 2 dan 5

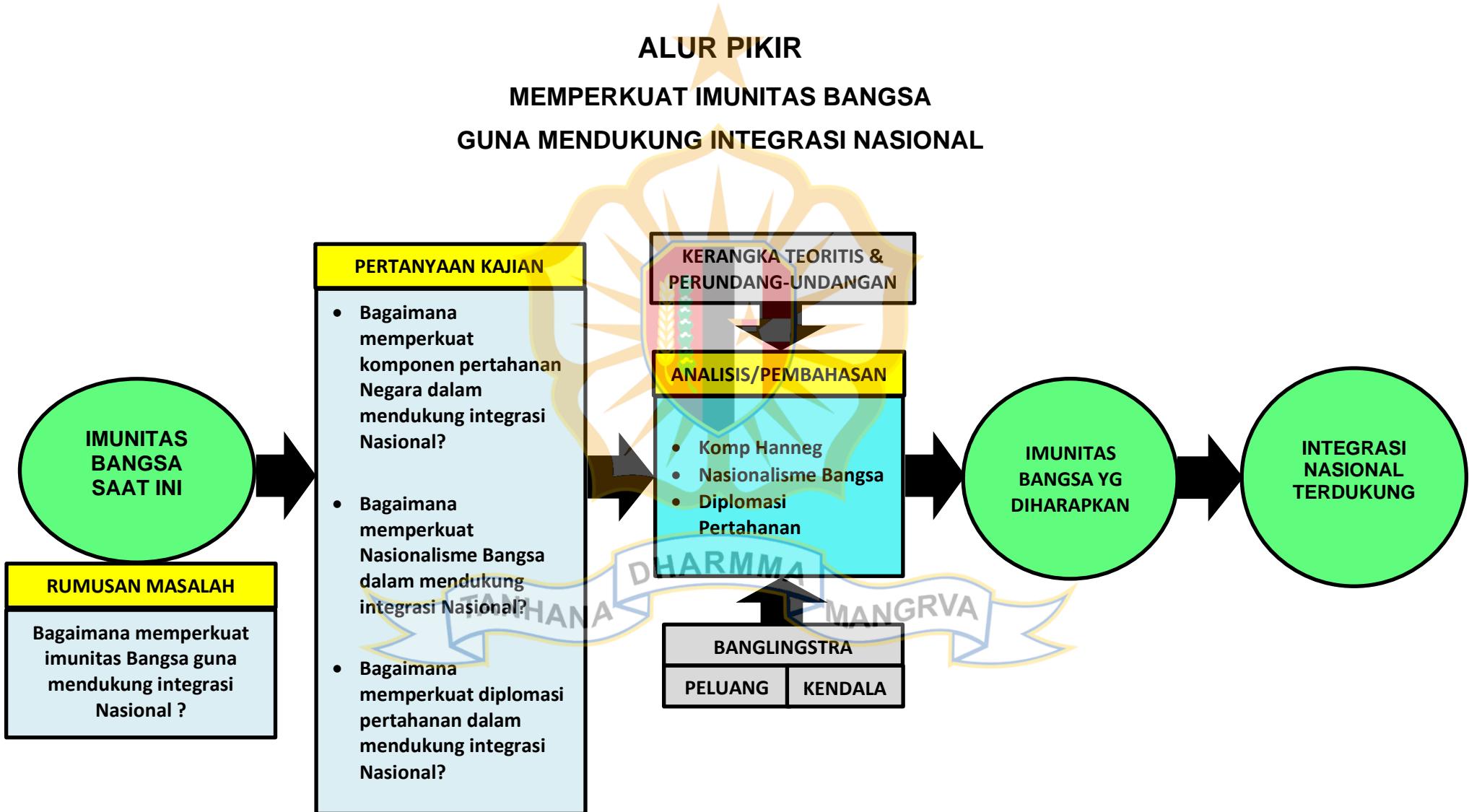
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional

UN Peacekeeping Operation. Jumlah personel dalam operasi perdamaian.

Diakses dari:<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/06/12/indonesia-menjadi-negara-dengan-jumlah-personil-pasukan-perdamaian-pbb-terbanyak-di-asean>. Pada 27 Juni 2020 pukul 10.45.





RIWAYAT HIDUP



Kolonel Arh Rikas Hidayatullah lahir di Jambi 50 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 1 Mei 1970. Dikaruniai putri dan putra (Sarah Afifah Risani H dan M Emir Faysal Dacini H) dari istri yang bernama Hanny Dwi Yanti Milleva. Lulus dari Akademi Militer pada tahun 1992. Melanjutkan Pendidikan dasar kecabangan Arhanud pada tahun 1993 selanjutnya secara berjenjang sampai dengan Pendidikan Sesko TNI pada tahun 2015. Pendidikan umum yang dilalui mulai dari SD sampai dengan SMA di daerah Jambi.

Beberapa penugasan operasi telah dilaksanakan dengan baik selama kedinasan di Militer antara lain tergabung dalam Satgas Pamtas dan Rahwan di Papua pada tahun 2014 dan Satgas Pamtas di Kaltim. Beberapa tanda jasa yang diperoleh antara lain Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, dan XXIV. Selain itu tanda jasa kehormatan lainnya adalah S.L. Wira Nusa, S.L. Dharma Nusa, S.L. Dwija Sistha dan yang terakhir Bintang KEP Nararya. Penugasan ke Luar negeri juga sudah pernah diemban yaitu ke beberapa Negara Asia, Eropa, Australia dan Amerika.

Selama penugasan telah banyak pengalaman jabatan khususnya di lingkungan TNI AD mulai dari Danton, Danrai dan Perwira Staf Batalyon di jajaran Kostrad dan Kodam Jaya, Pasiops dan Danramil di Kodim Jaksel Kodam Jaya, menjadi Gumlil di Pusdik Arhanud, Pabanda Organisasi di Sopsad, Komandan Batalyon di Yonarnahud-1/Div-1 Kostrad, Dandim 1001/Amt di Kalsel, Pabandya Doktrin di Sopsad, Kapendam di Kodam XVII/Cendrawasih, Kasrem 091/ASN di Samarinda, Danpusdik Arhanud di Malang dan yang terakhir sebagai Paban IV/Bindok Sopsad.